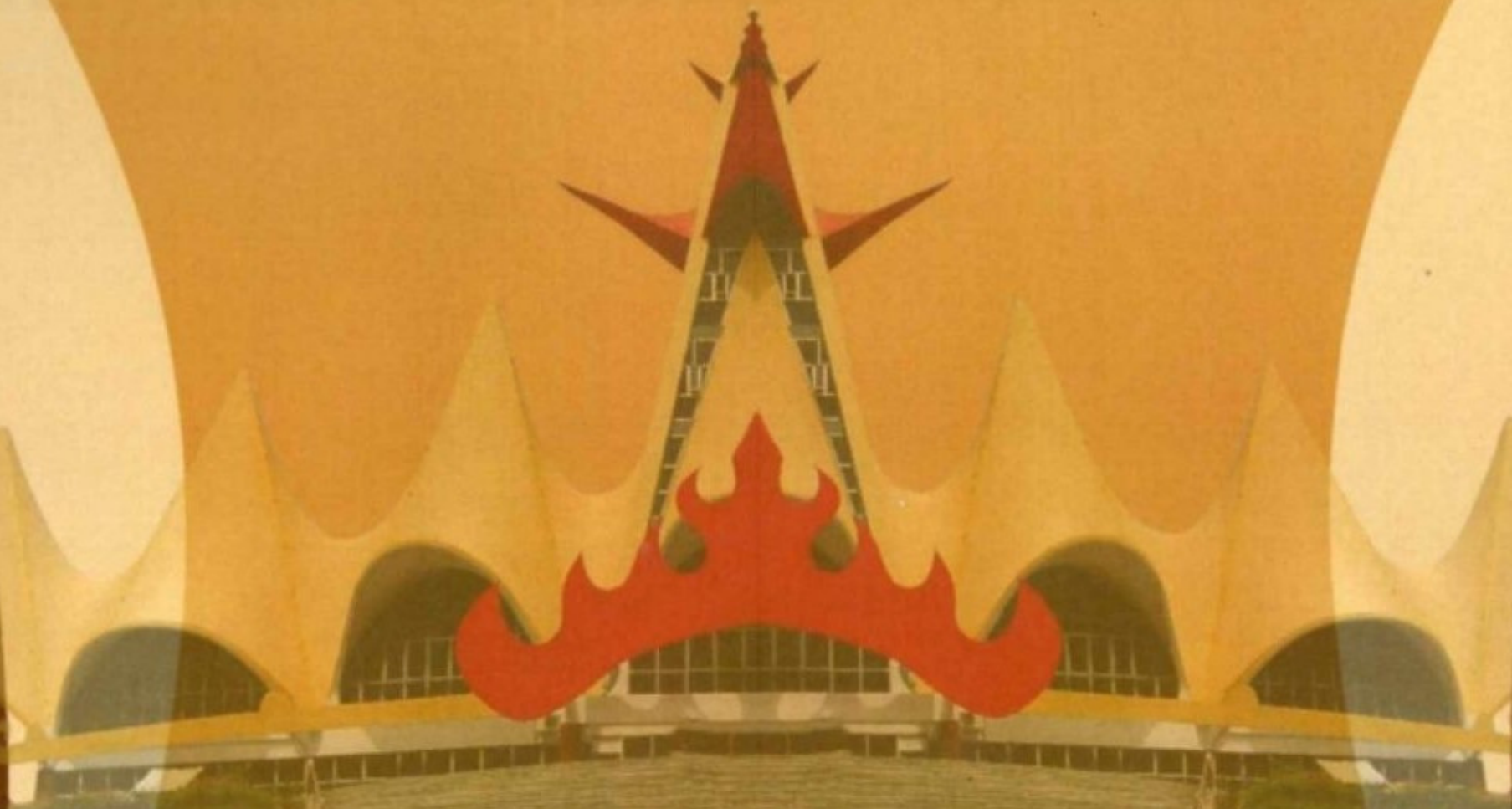




PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Jenderal Gatot Subroto No. 44 Telpn/ Fax.(0721).264904
Bandar Lampung

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 060 /1867 /V.06/SET/2022

TENTANG PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan lampiran peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi Pemerintah, disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatur maka sesuai keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/400/B.07/HK/2021 tentang peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu dibentuk Peta Proses Bisnis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

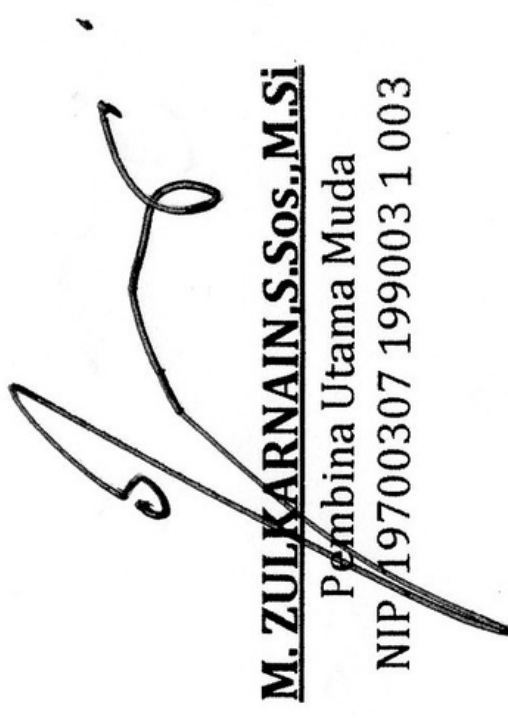
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/400/B.07/HK/2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tentang Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Kesatu : Menetapkan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Proses Bisnis yang meliputi Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, Peta Sub Proses, serta Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun berdasarkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi, untuk mencapai visi misi Pemerintah Provinsi Lampung.
- Ketiga : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, digunakan sebagai acuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

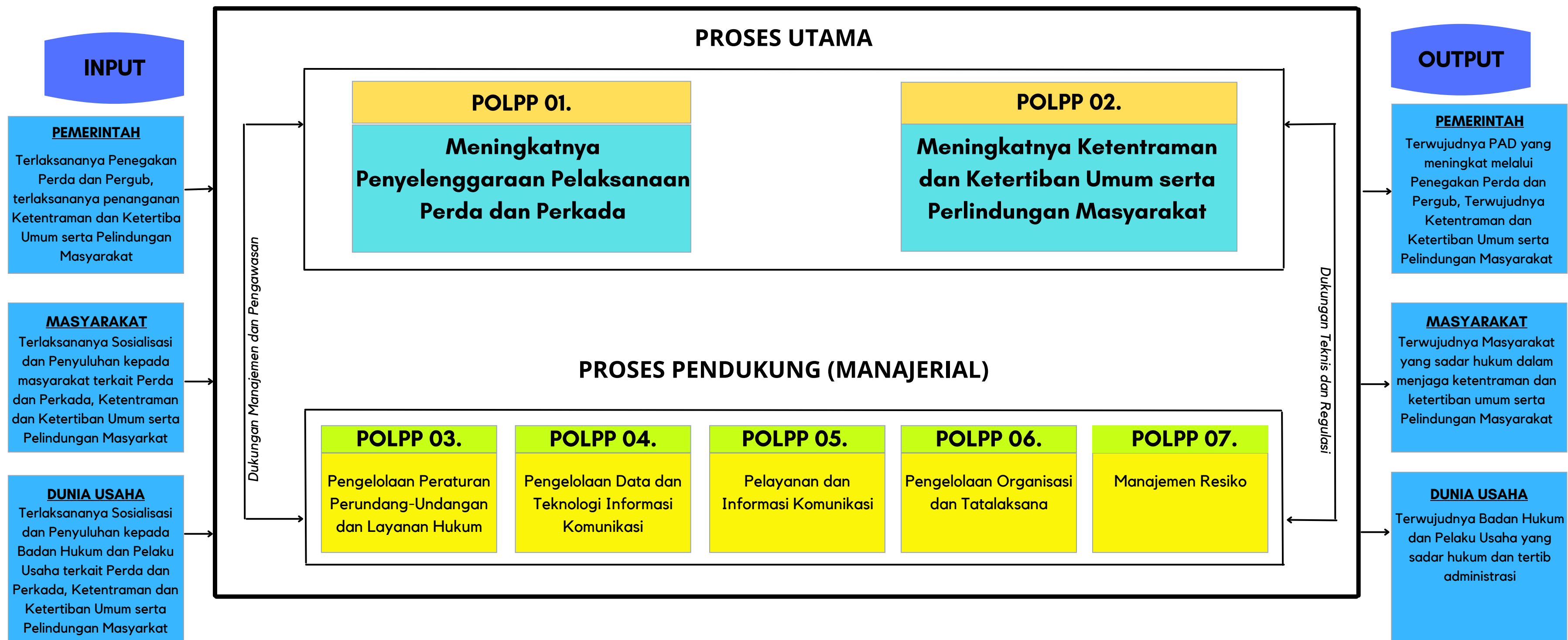
Ditetapkan : Bandar Lampung
Padatanggal : 15 Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG

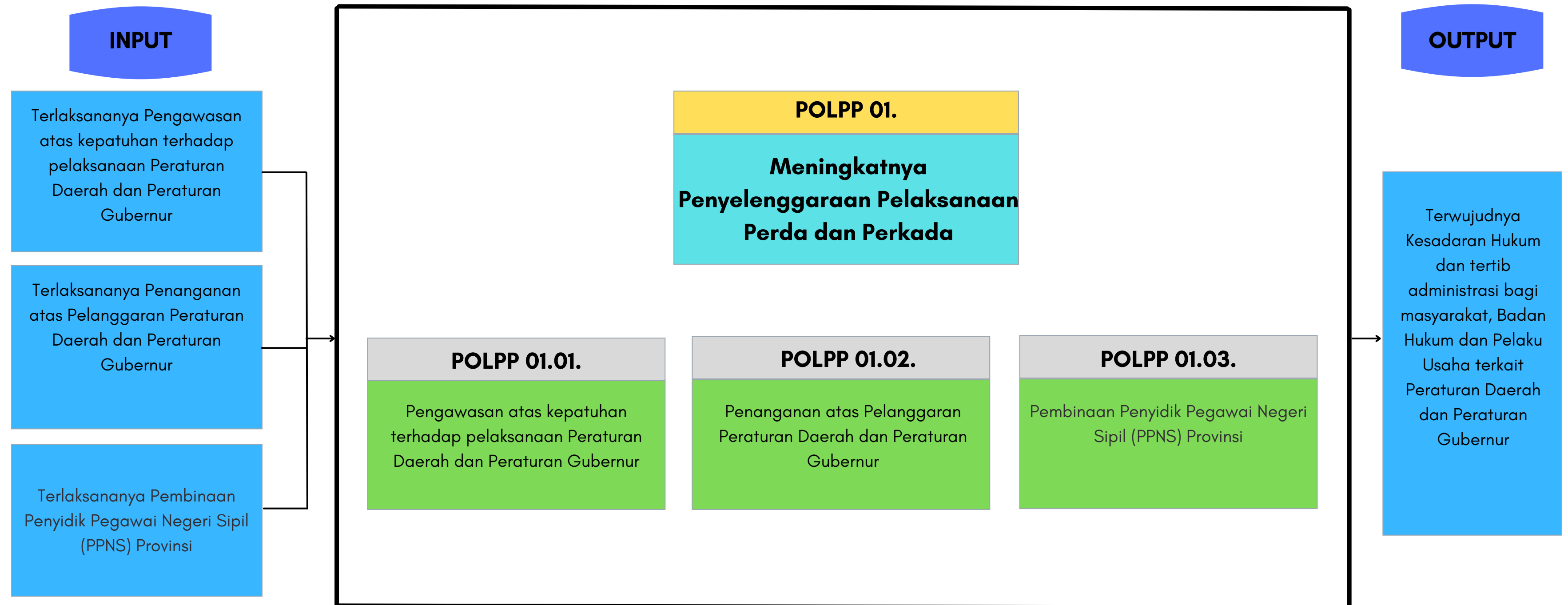


M. ZULKARNAIN.S.Sos..M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700307 199003 1 003

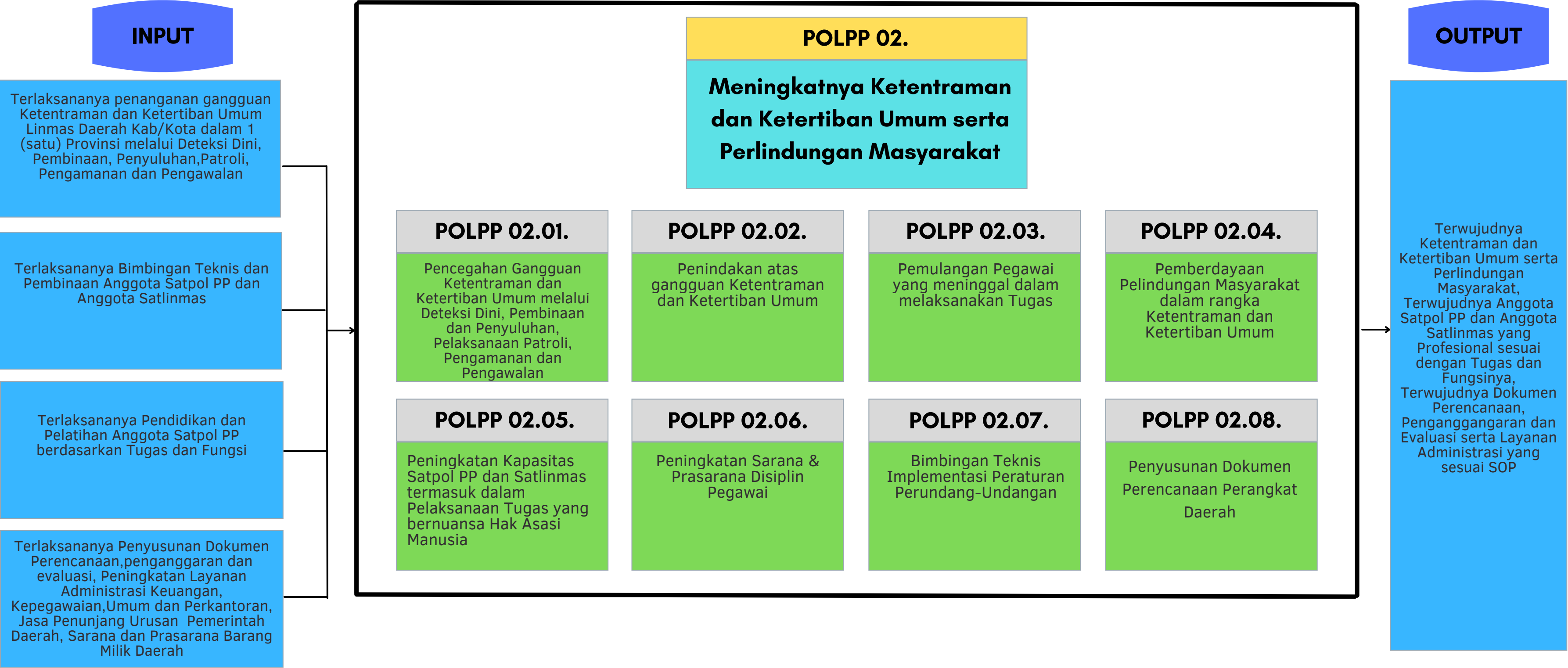
PETA PROSES BISNIS (PROSES UTAMA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG



PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG



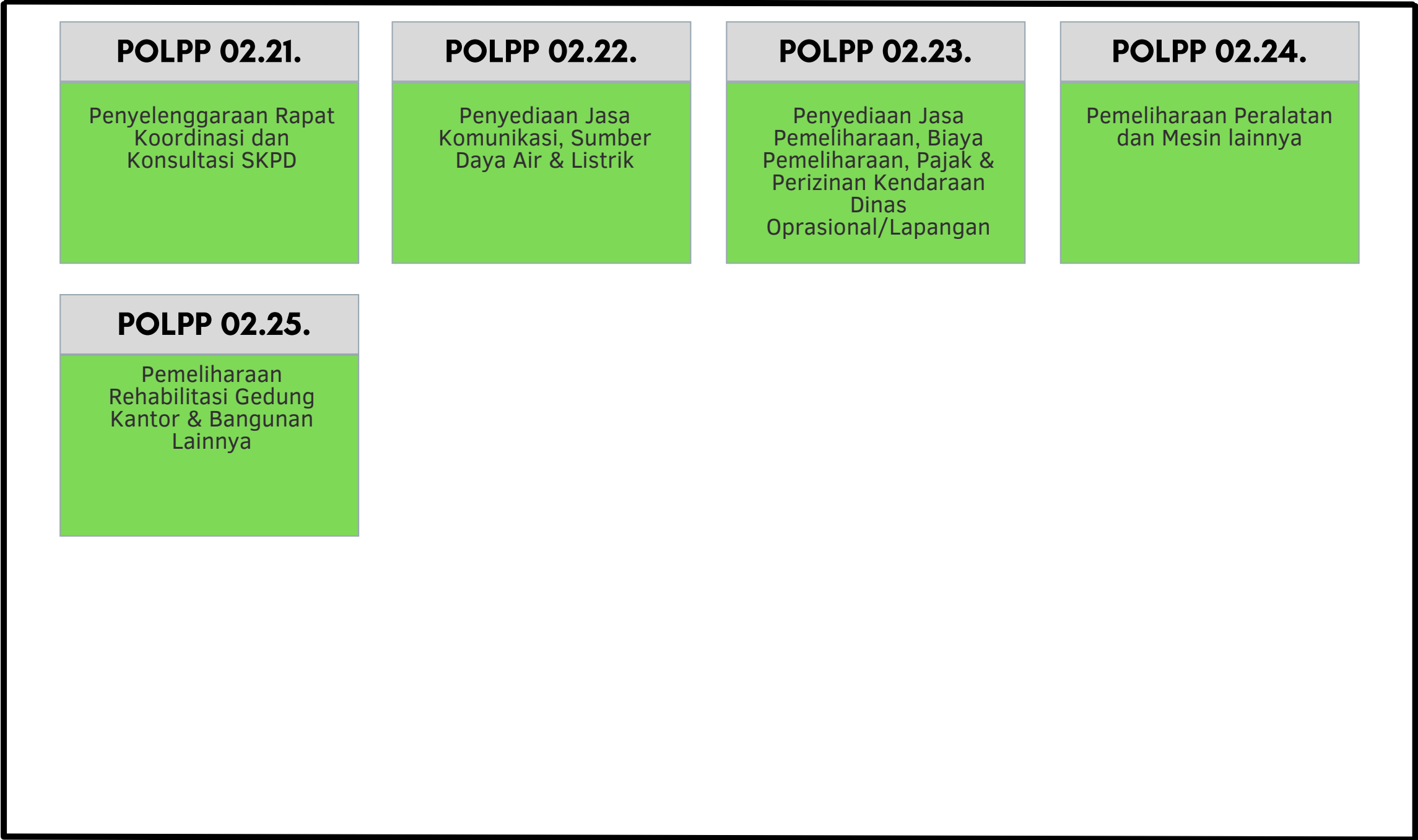
**PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**



PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

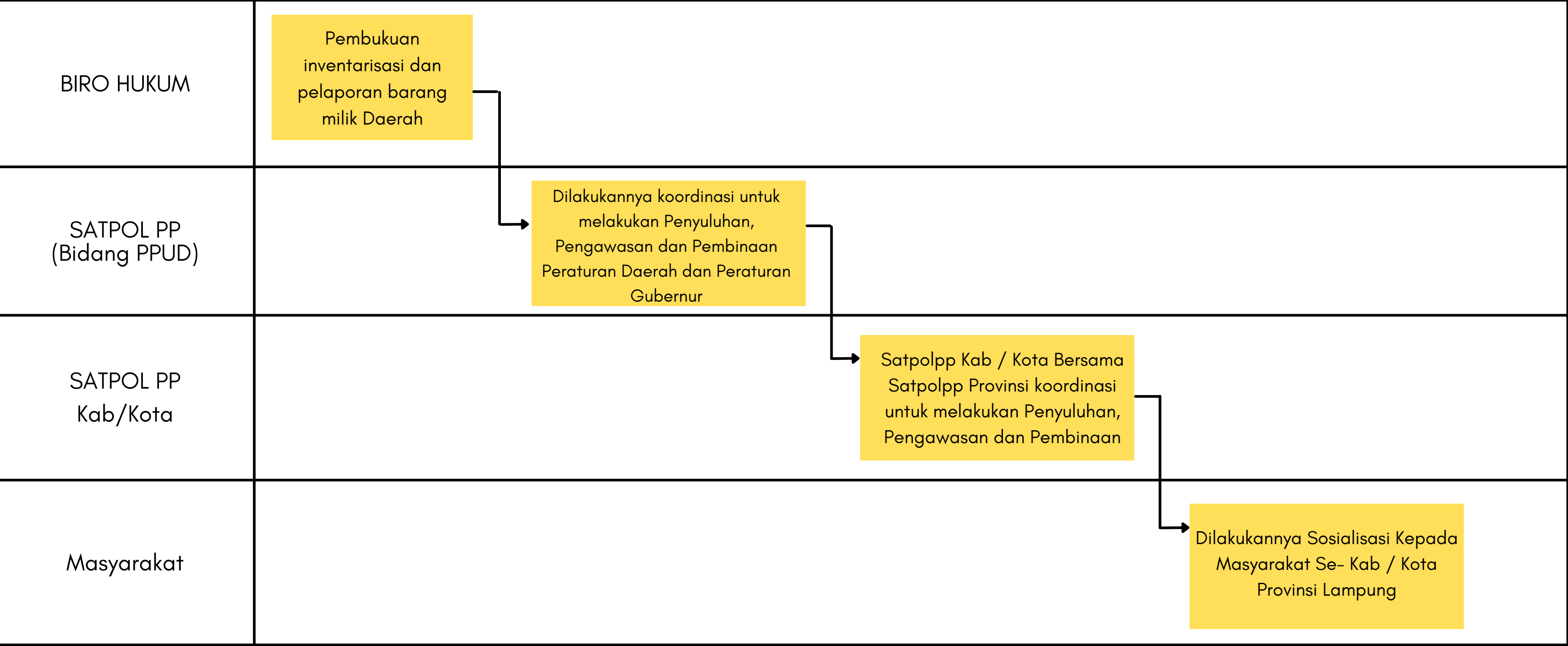
POLPP 02.09. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	POLPP 02.10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	POLPP 02.11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	POLPP 02.12. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
POLPP 02.13. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	POLPP 02.14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	POLPP 02.15. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	POLPP 02.16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
POLPP 02.17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	POLPP 02.18. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	POLPP 02.19. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	POLPP 02.20. Penyediaan Bahan / Material

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG



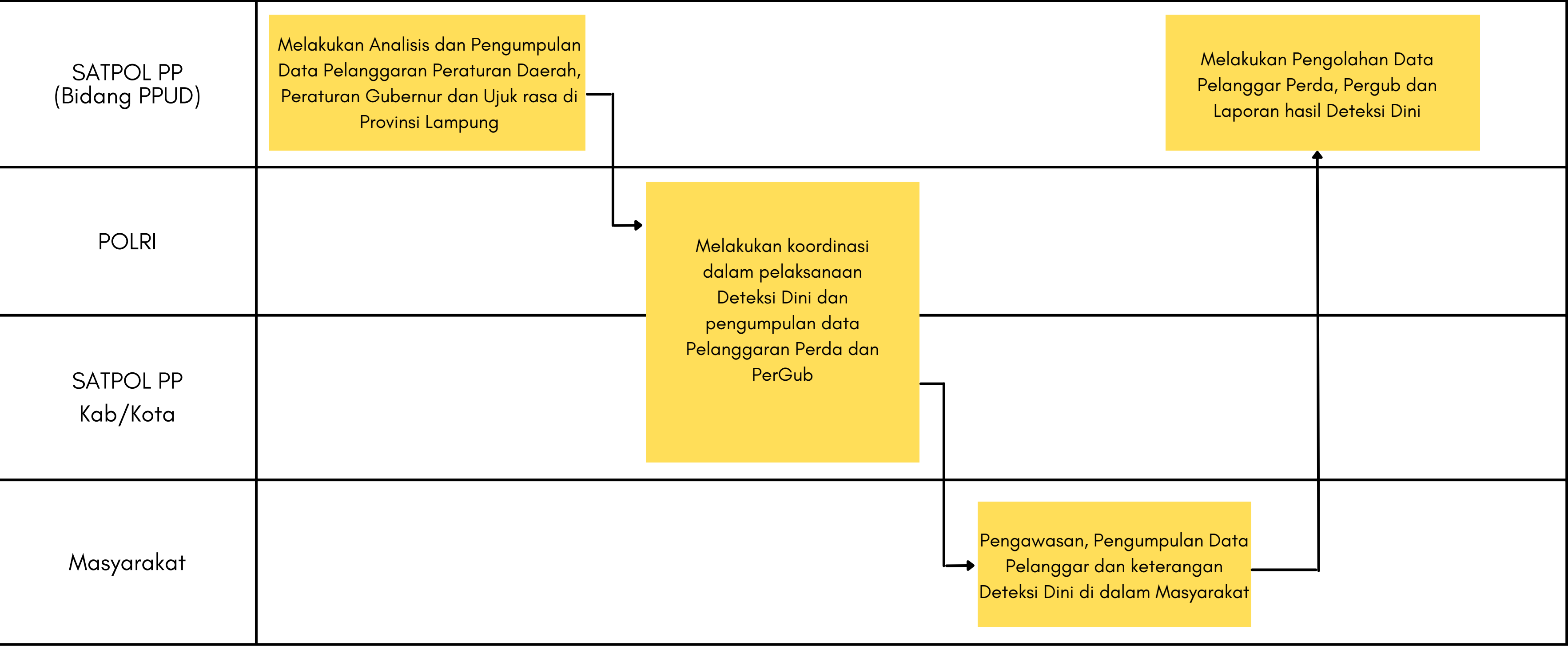
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
(Pol PP 01.01.)



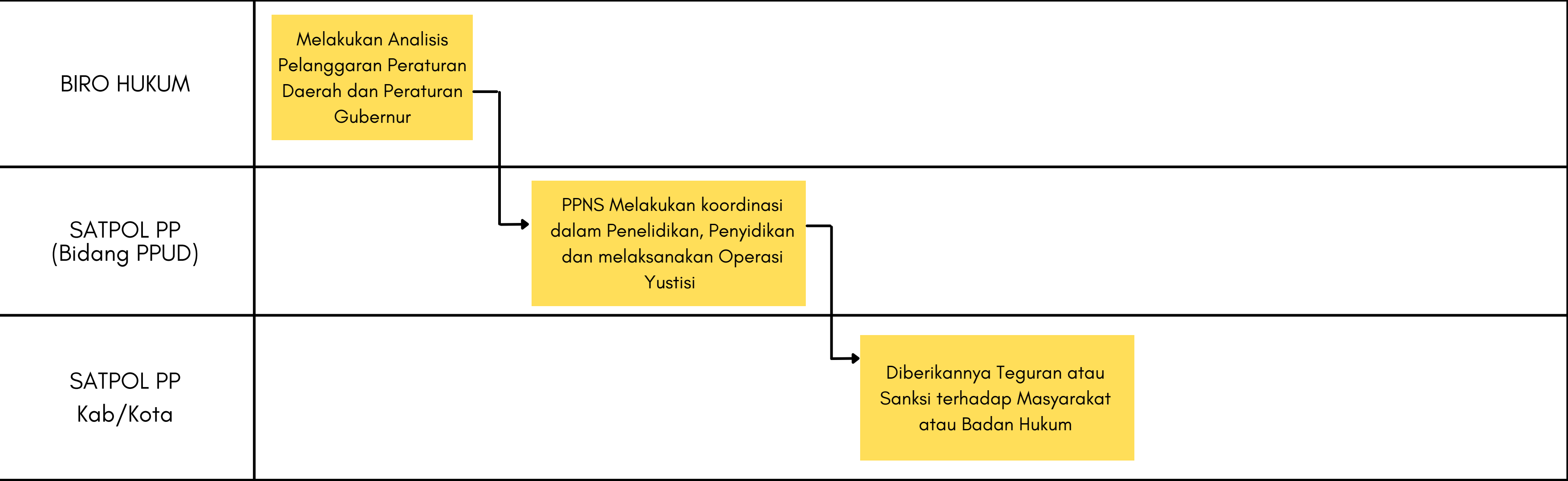
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
(Pol PP 01.02.)



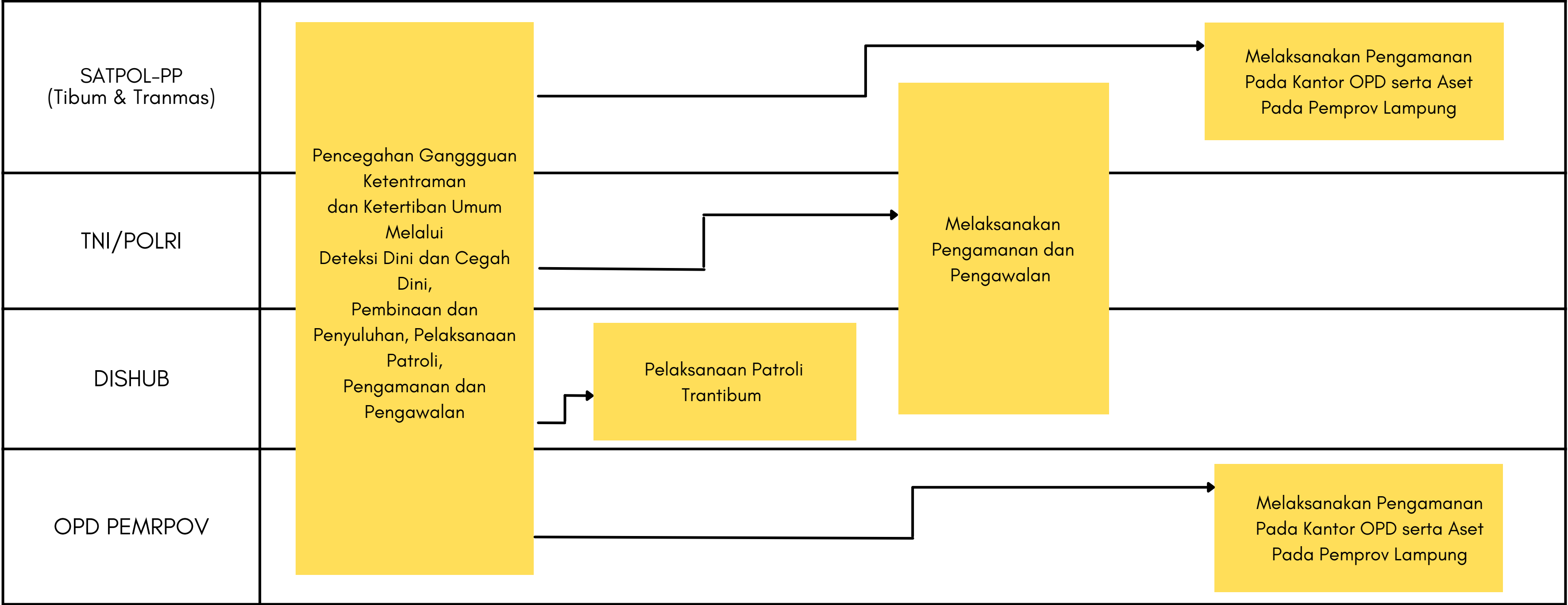
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
(Pol PP 01.03.)

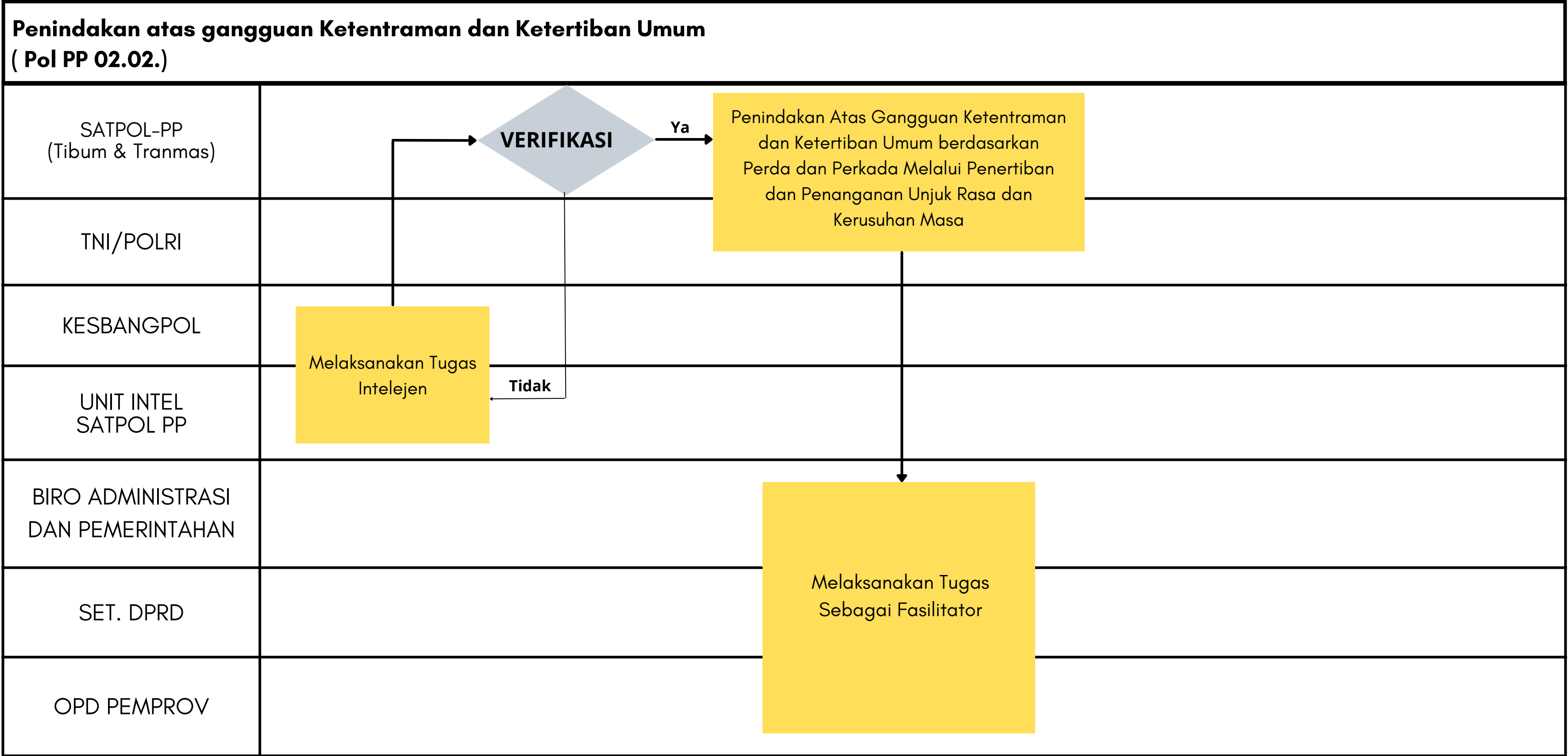


PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
(Pol PP 02.01.)

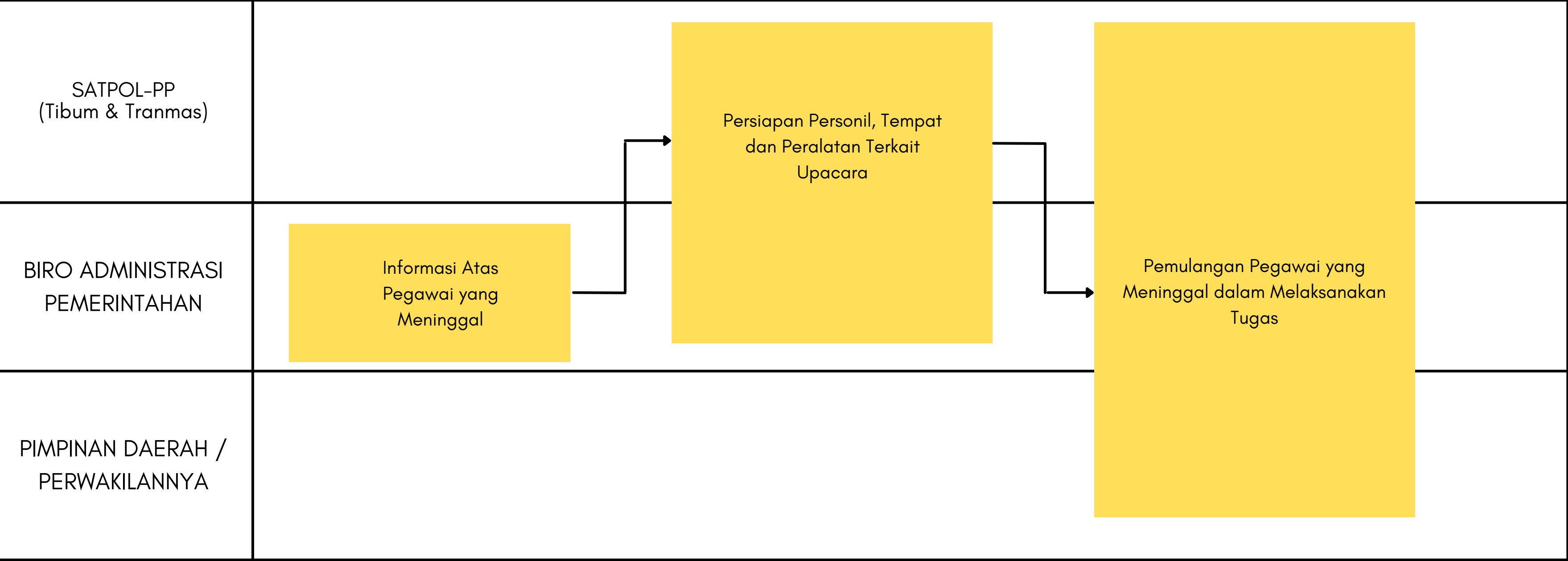


PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG



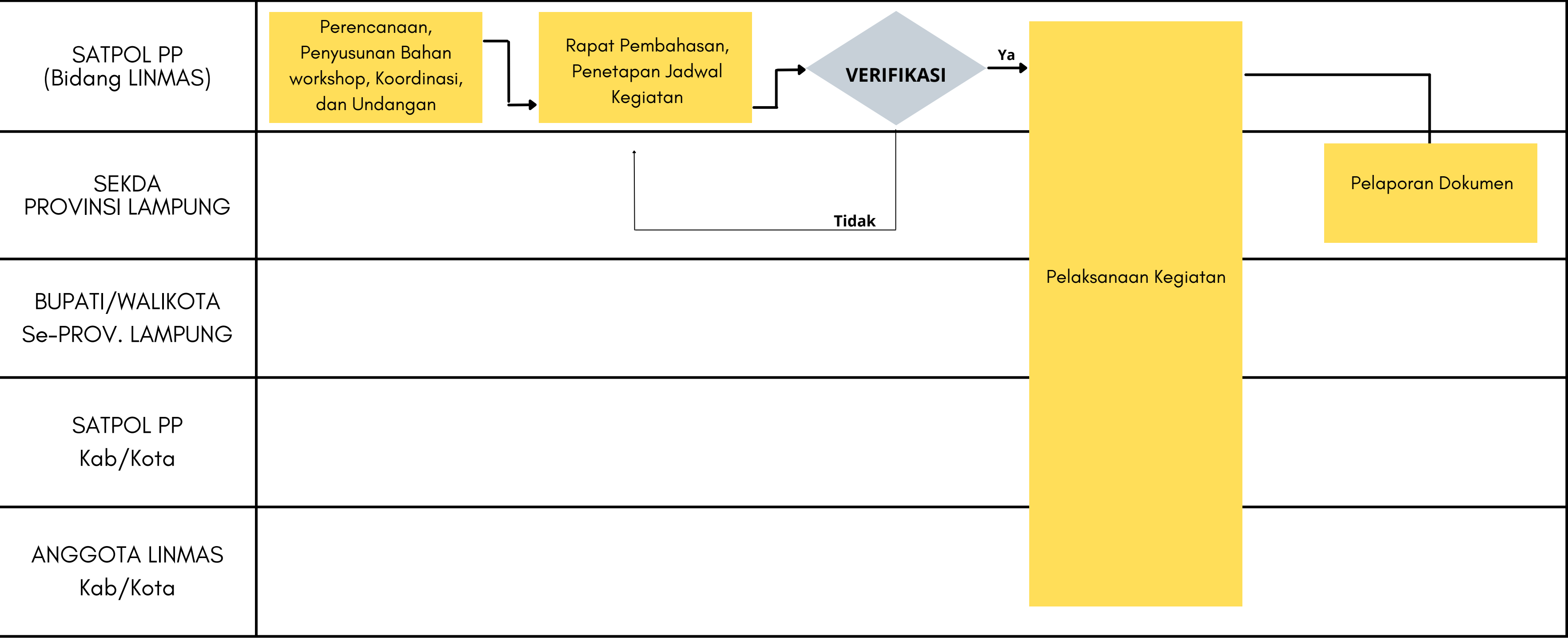
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas
(Pol PP 02.03.)



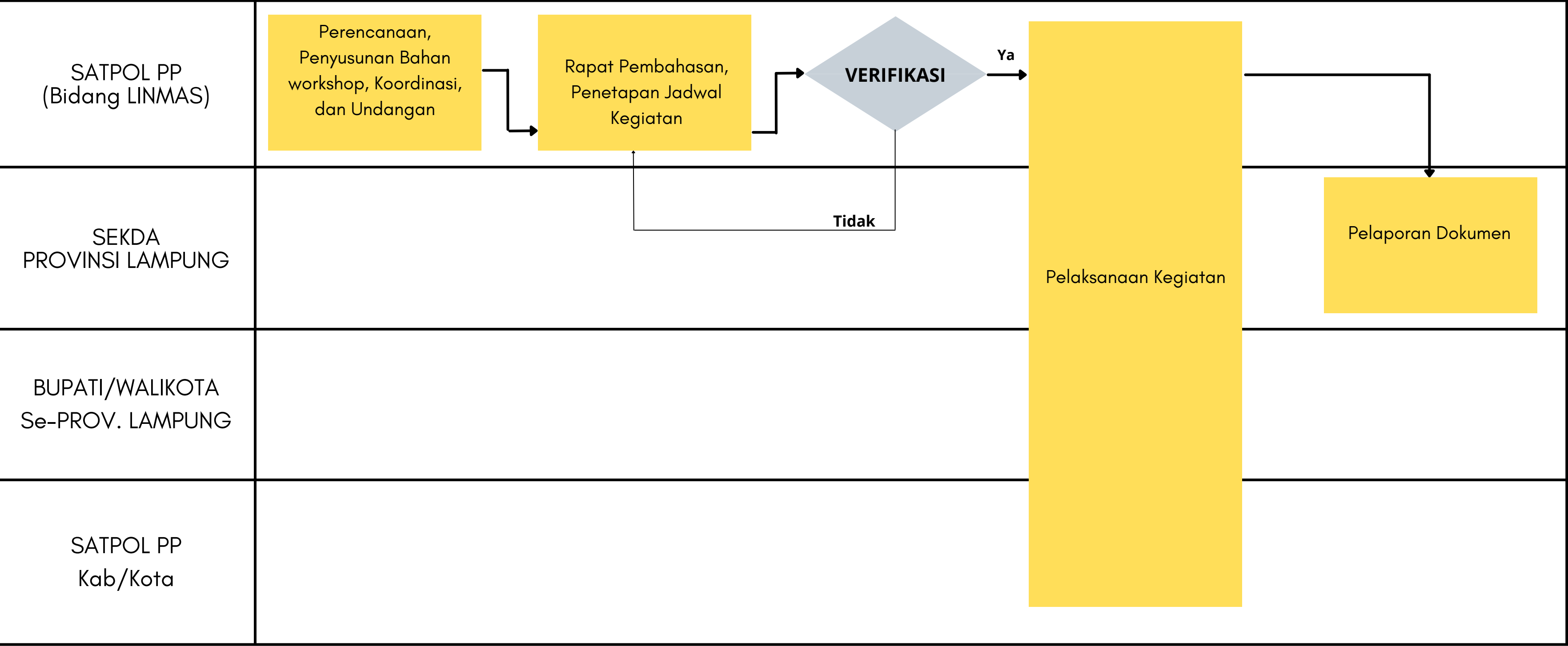
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
(Pol PP 02.04.)



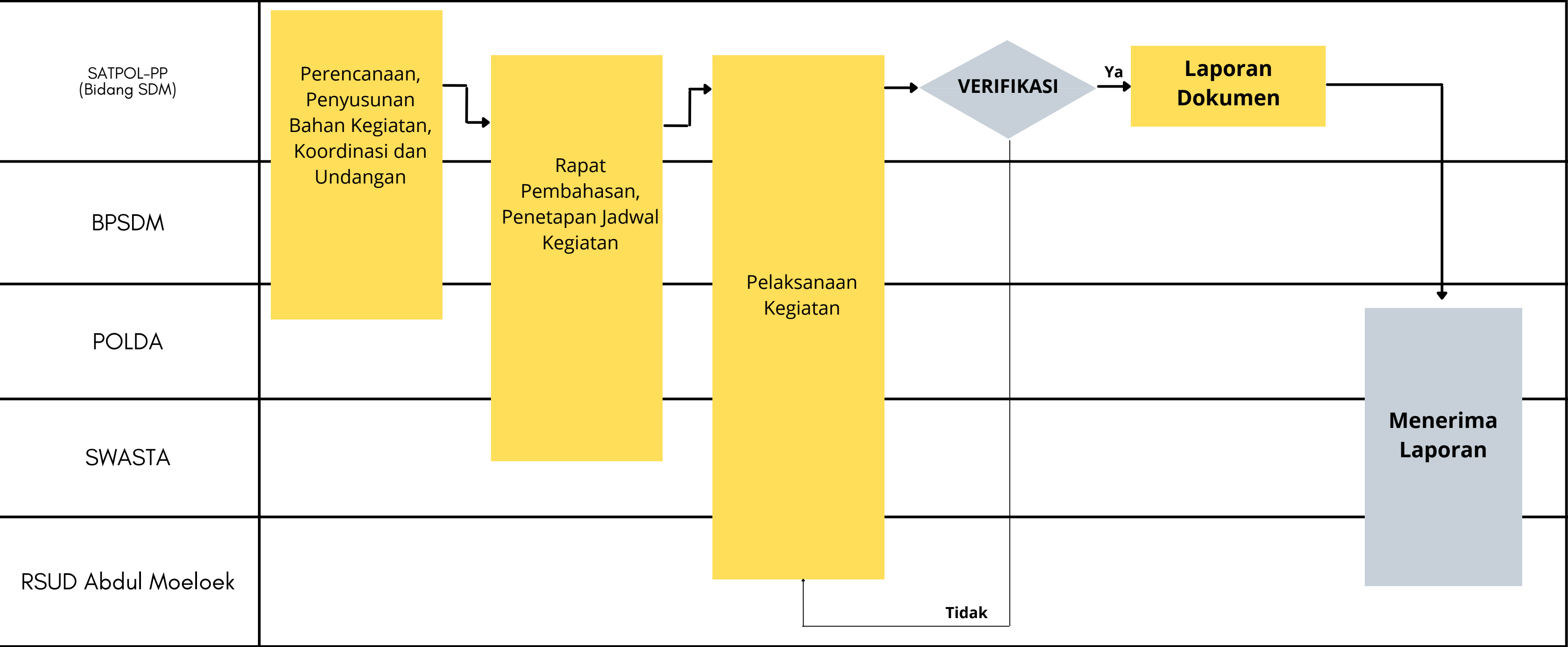
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
(Pol PP 02.05.)



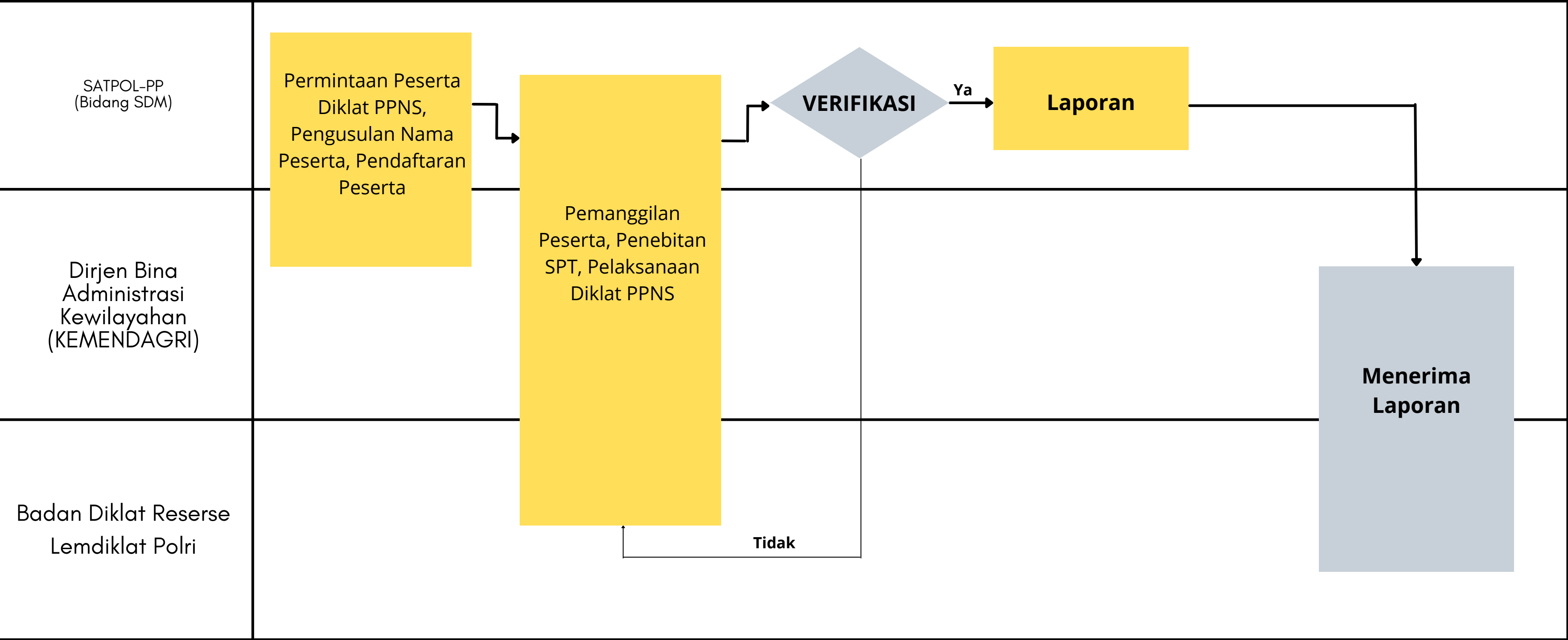
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
(Pol PP 02.06)

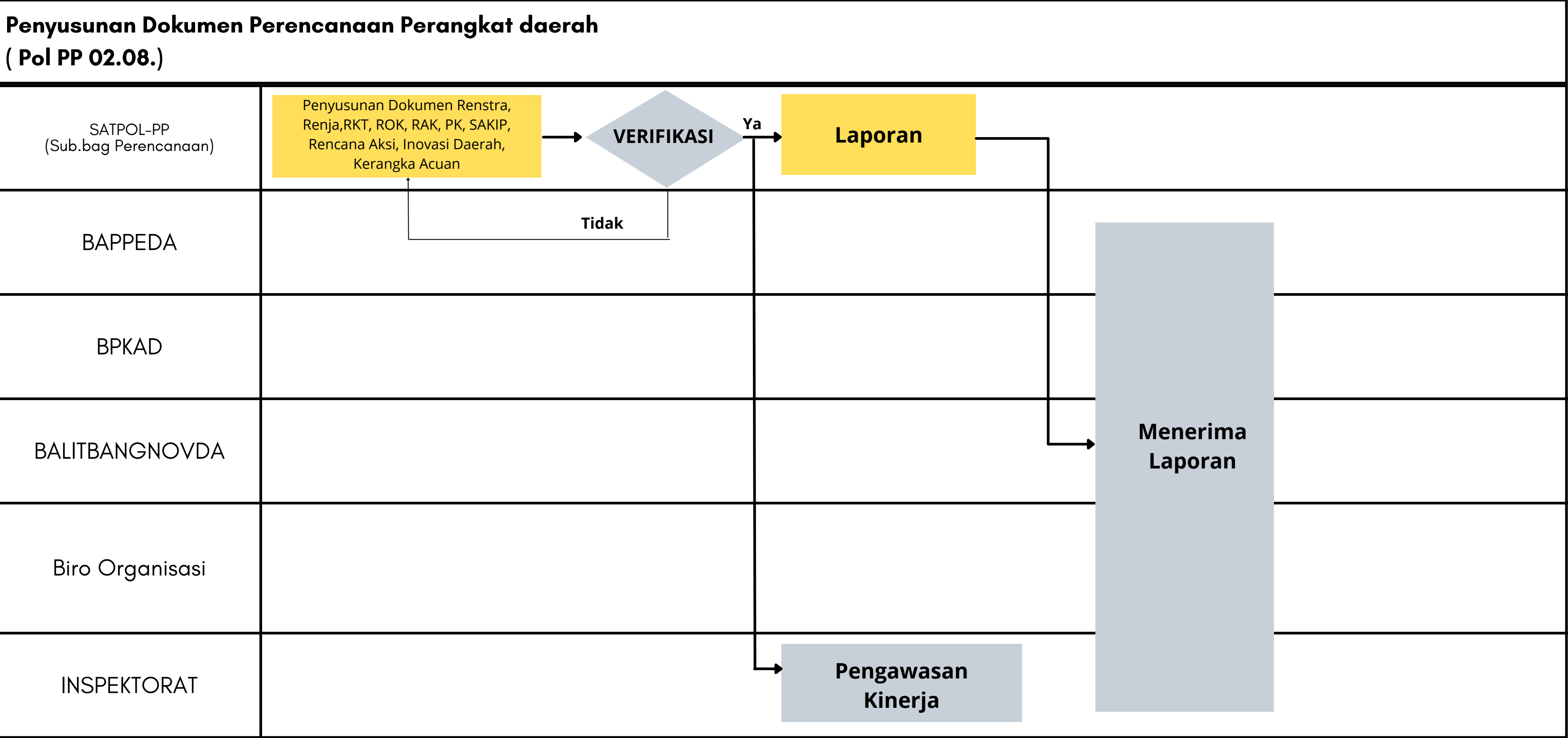


PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

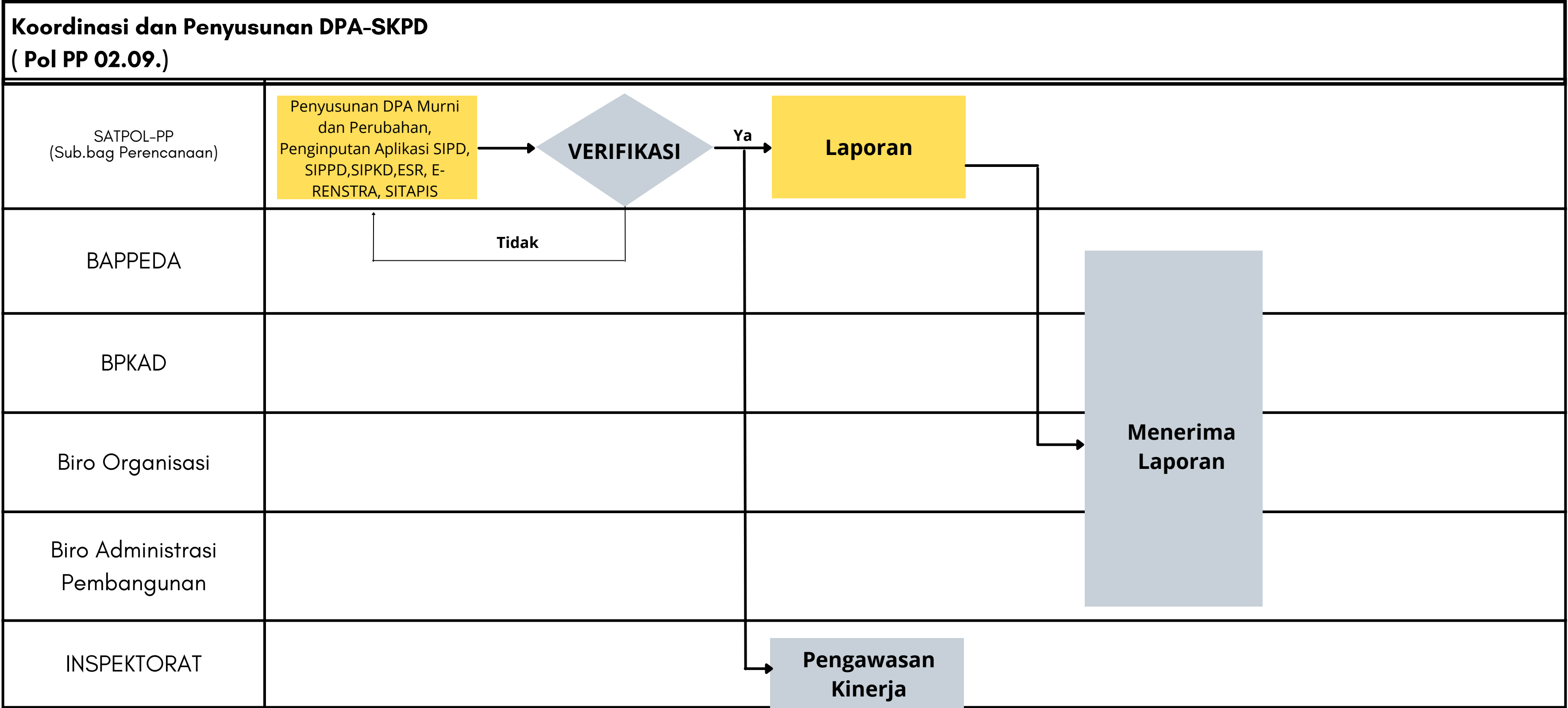
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
(Pol PP 02.07.)



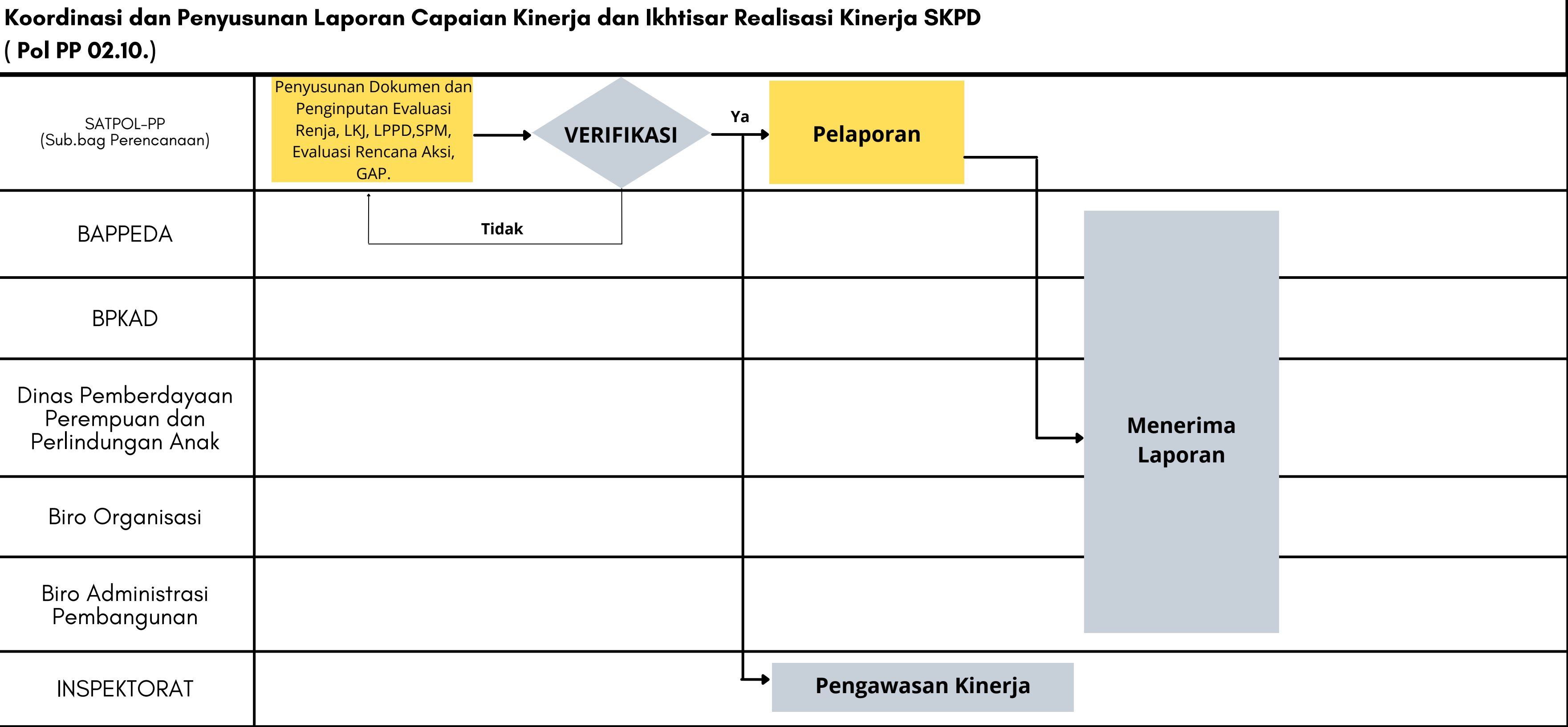
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG



PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

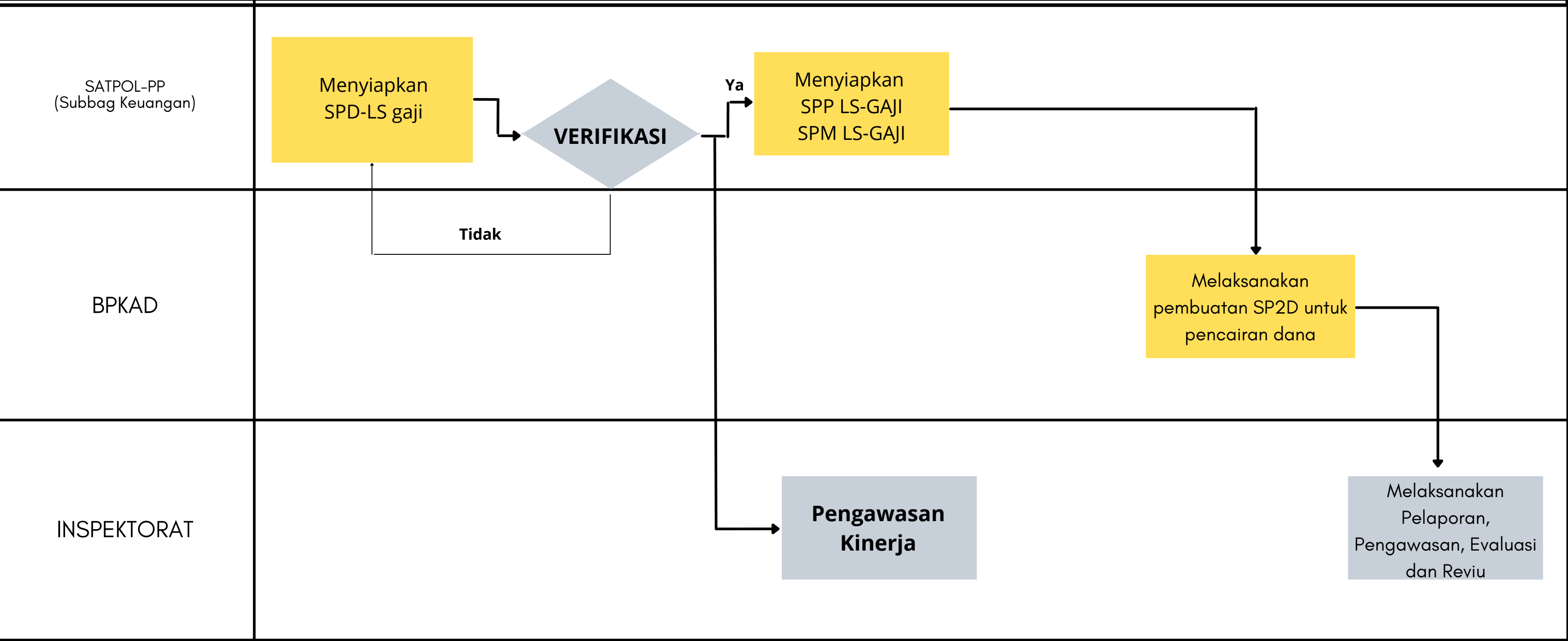


PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG



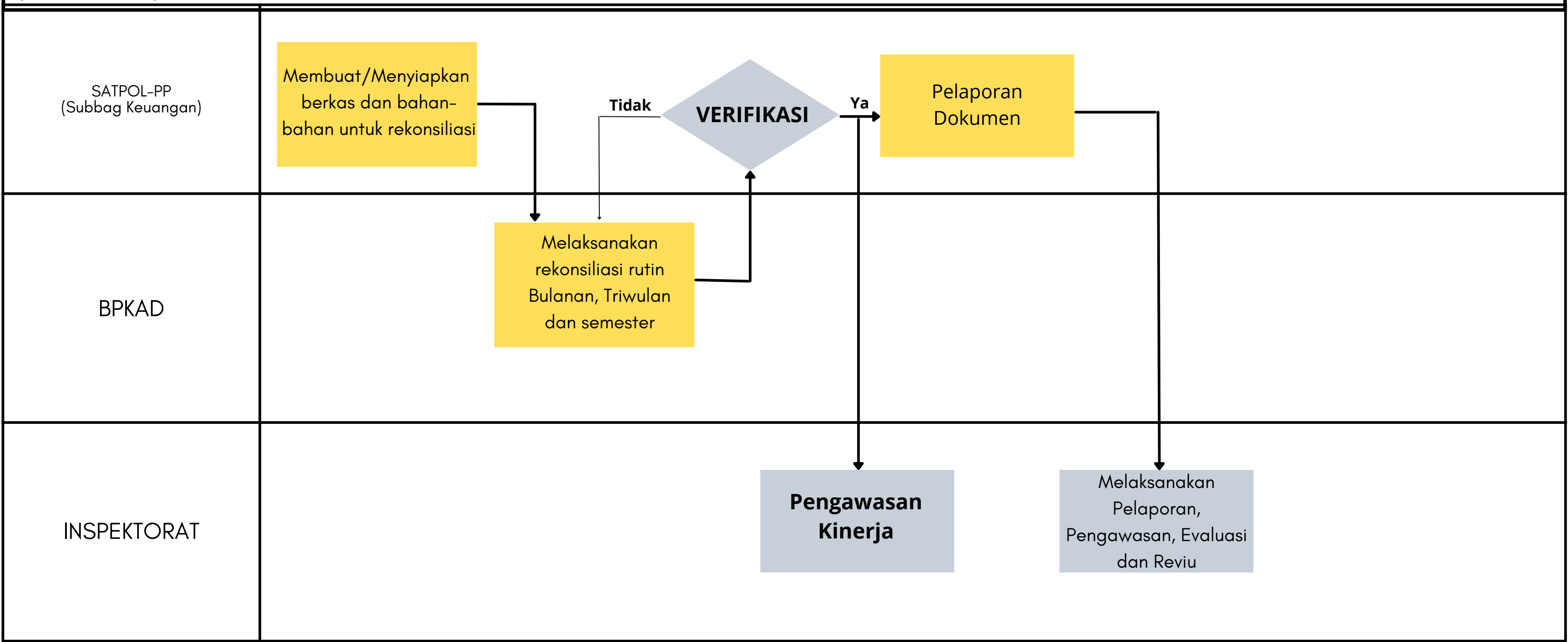
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
(Pol PP 02.11.)



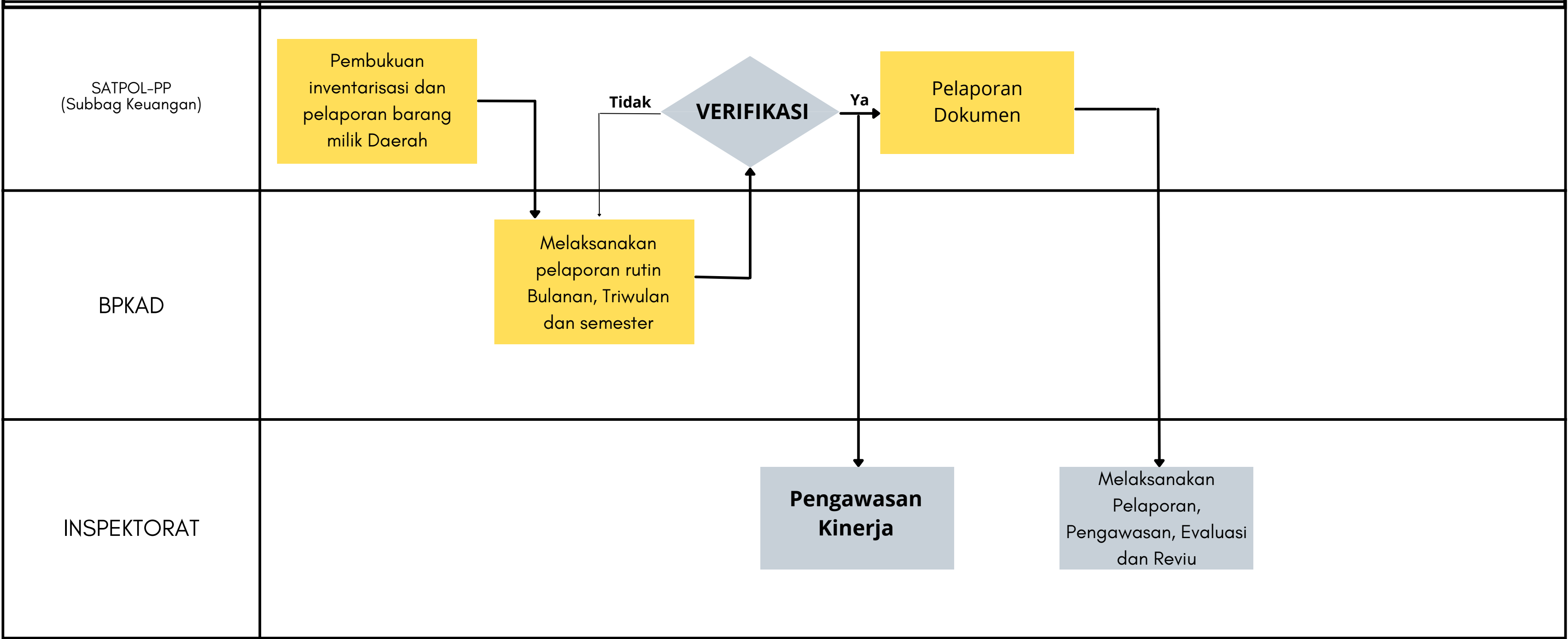
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapopran Barang Milik Daerah Pada SKPD
(Pol PP 02.12.)



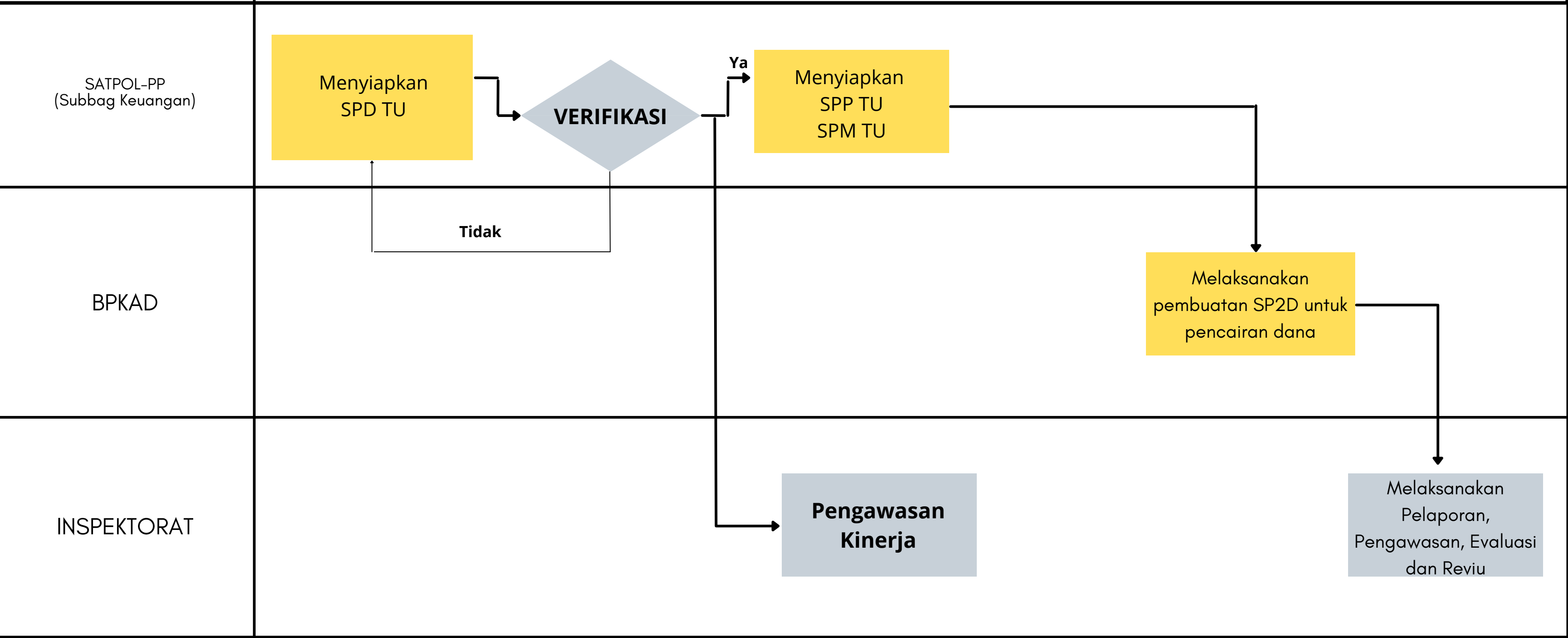
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
(Pol PP 02.13.)



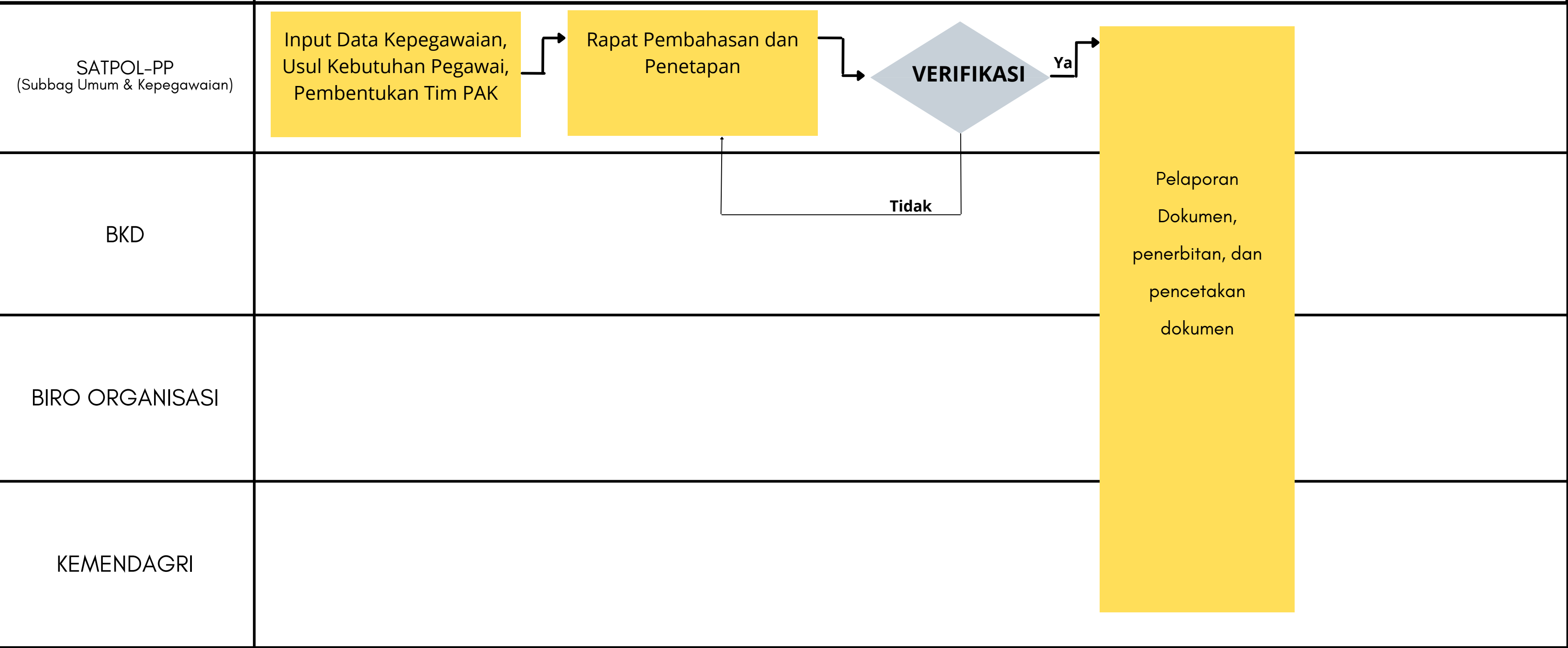
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
(Pol PP 02.14.)



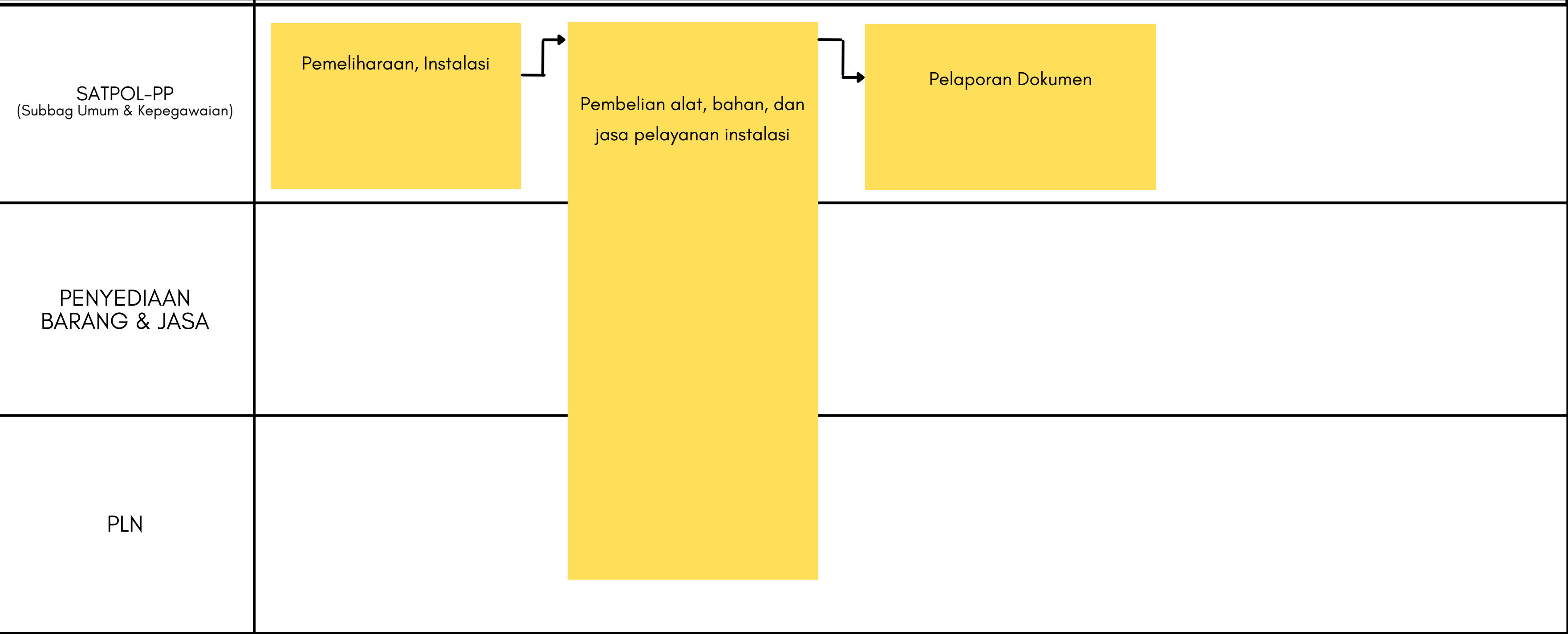
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
(Pol PP 02.15.)



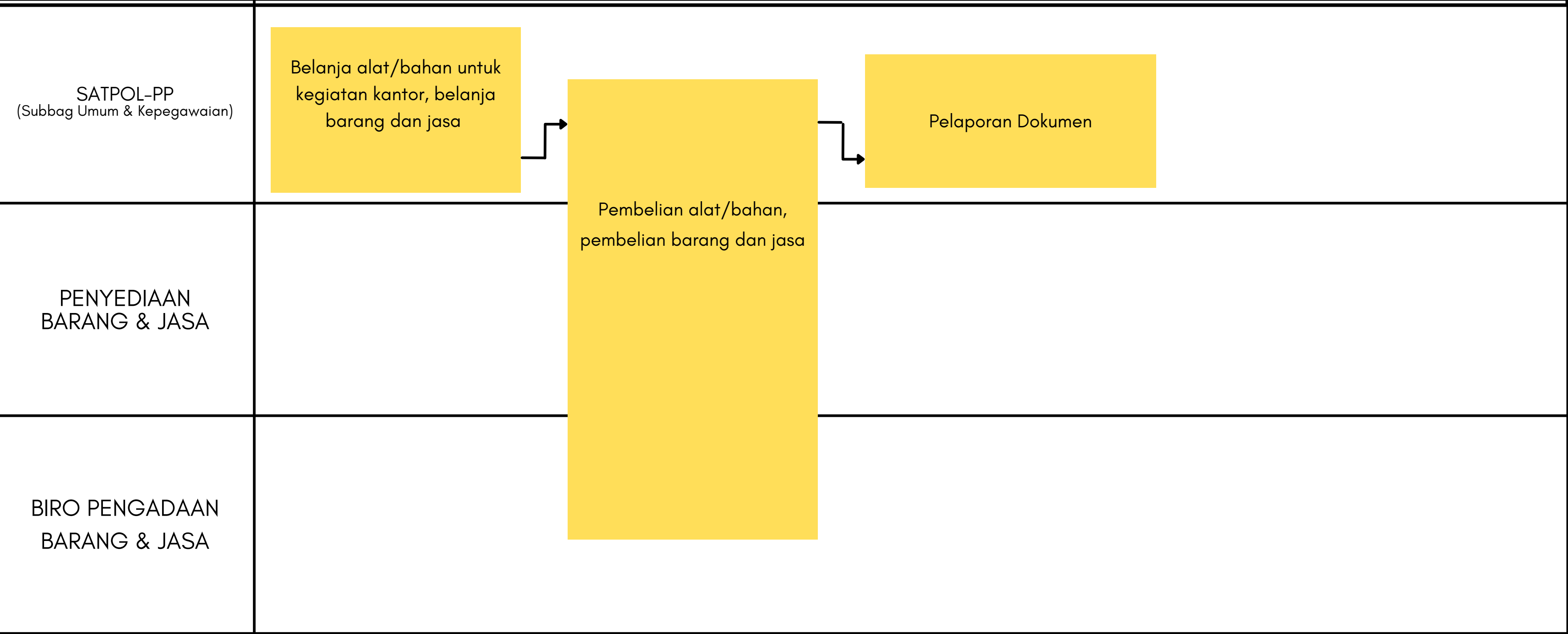
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor
(Pol PP 02.16.)



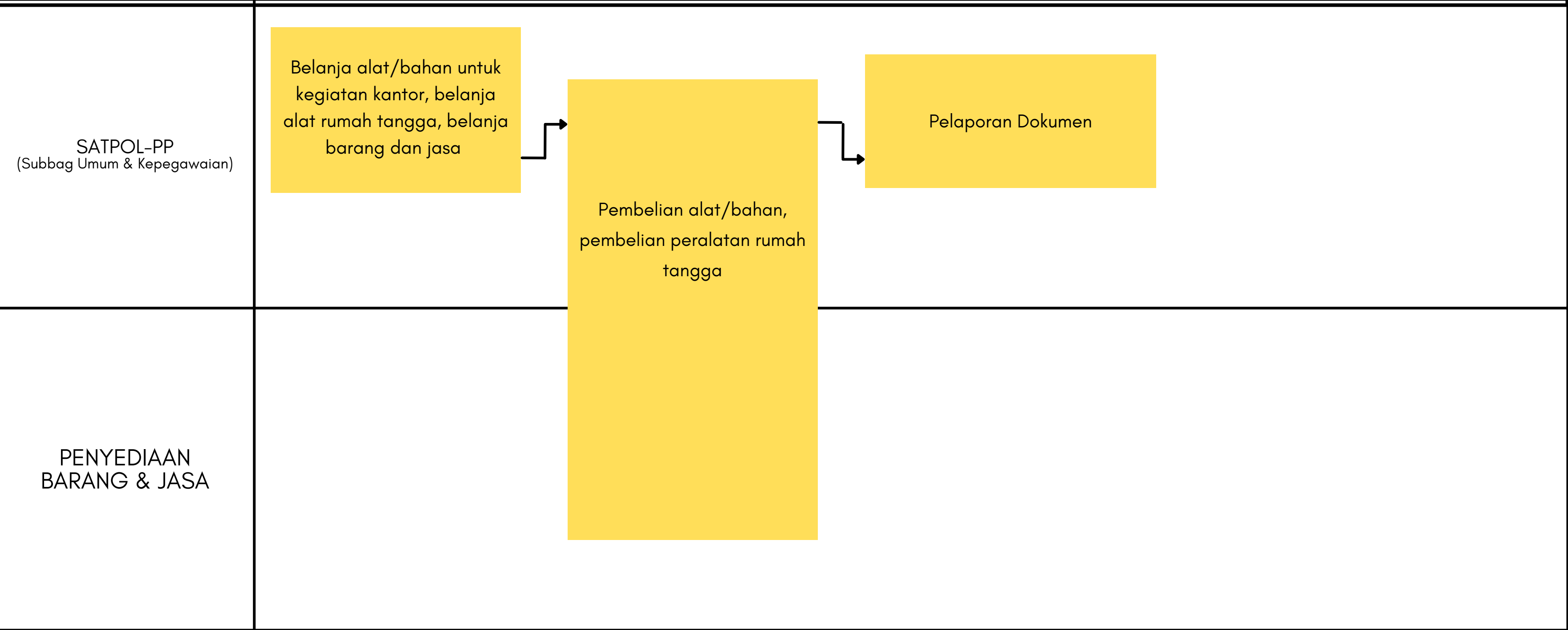
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Pol PP 02.17.)



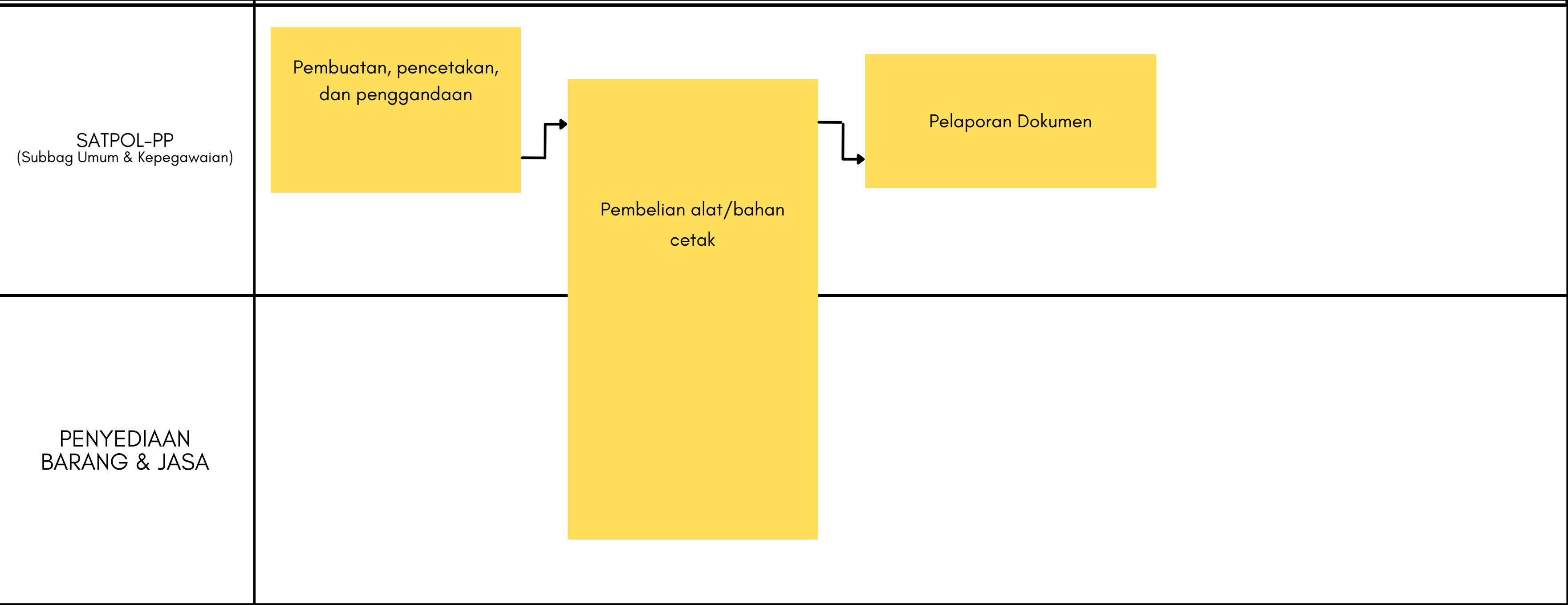
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
(Pol PP 02.18.)



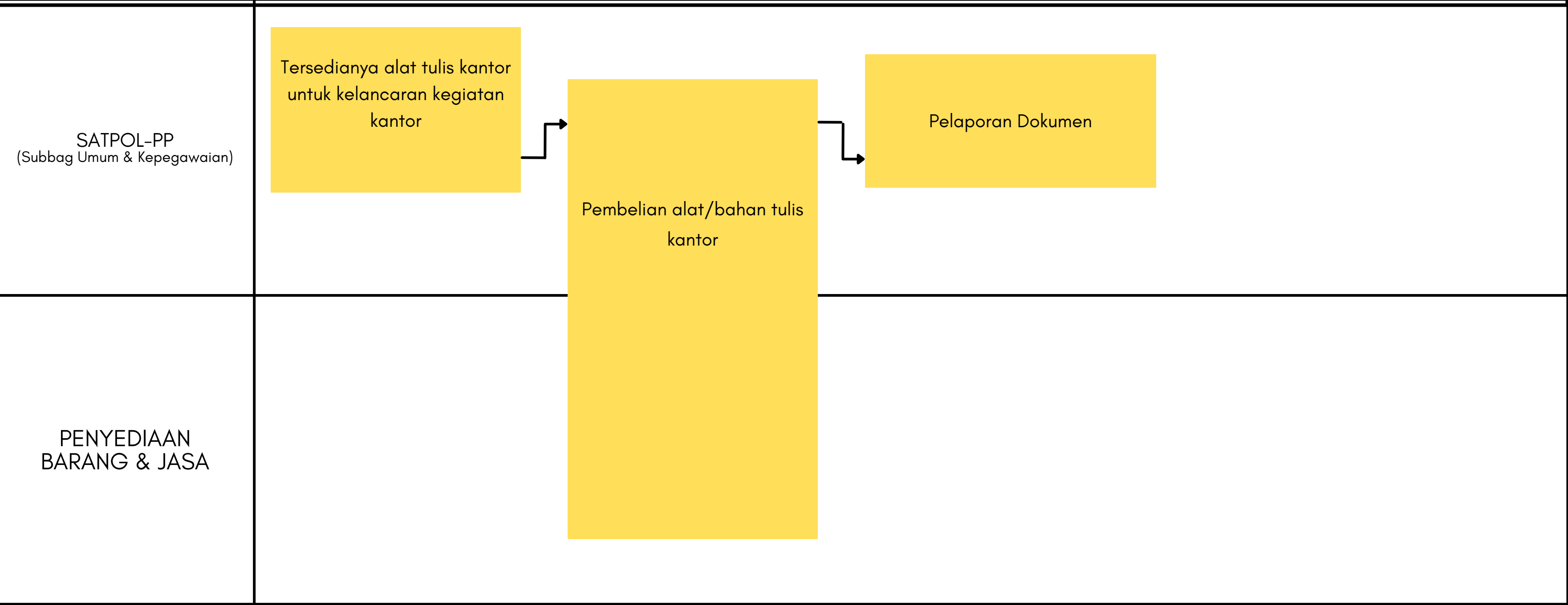
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
(Pol PP 02.19.)



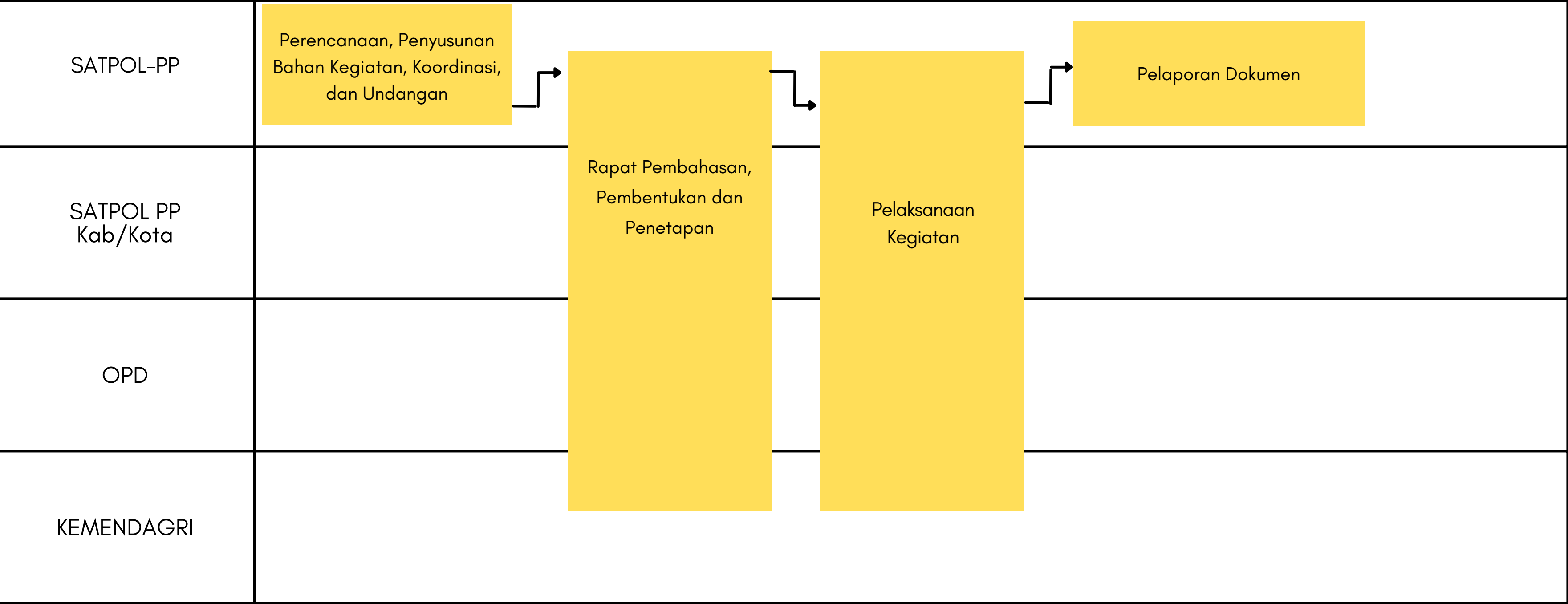
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Bahan / Material
(Pol PP 02.20.)



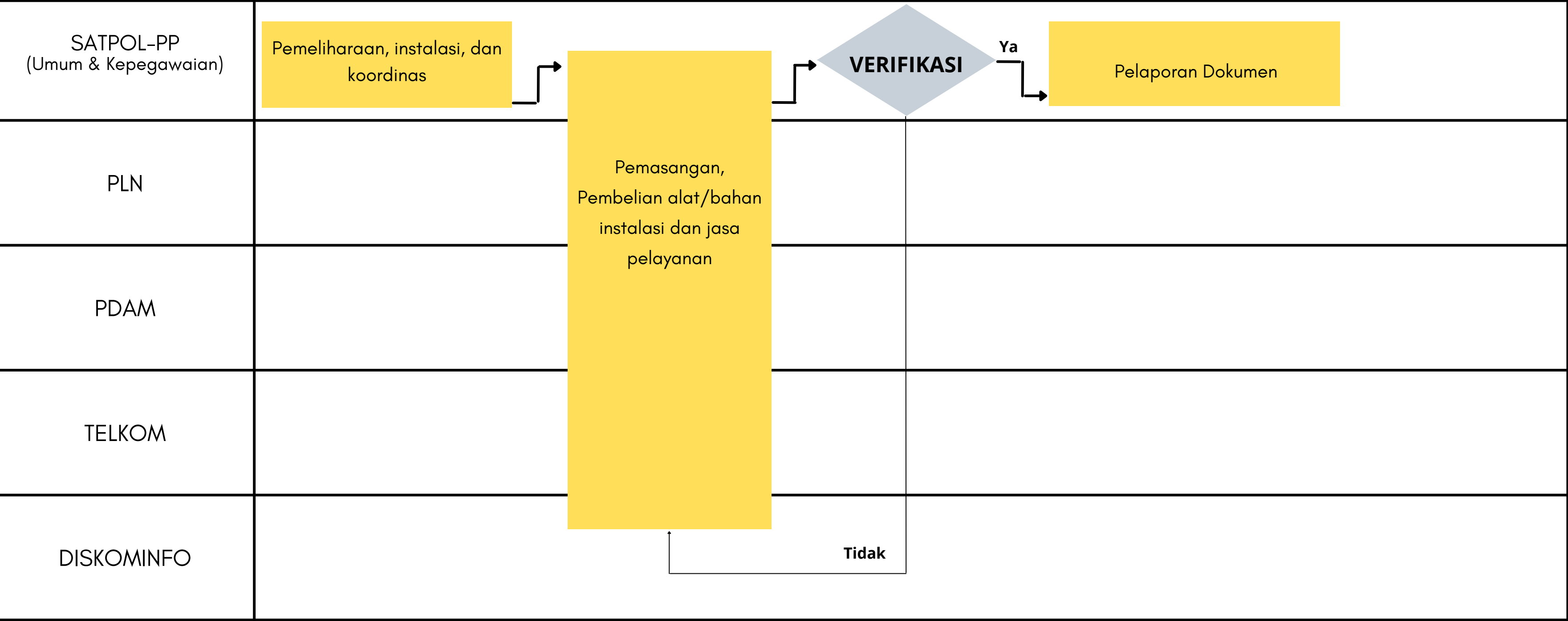
PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Pol PP 02.21.)

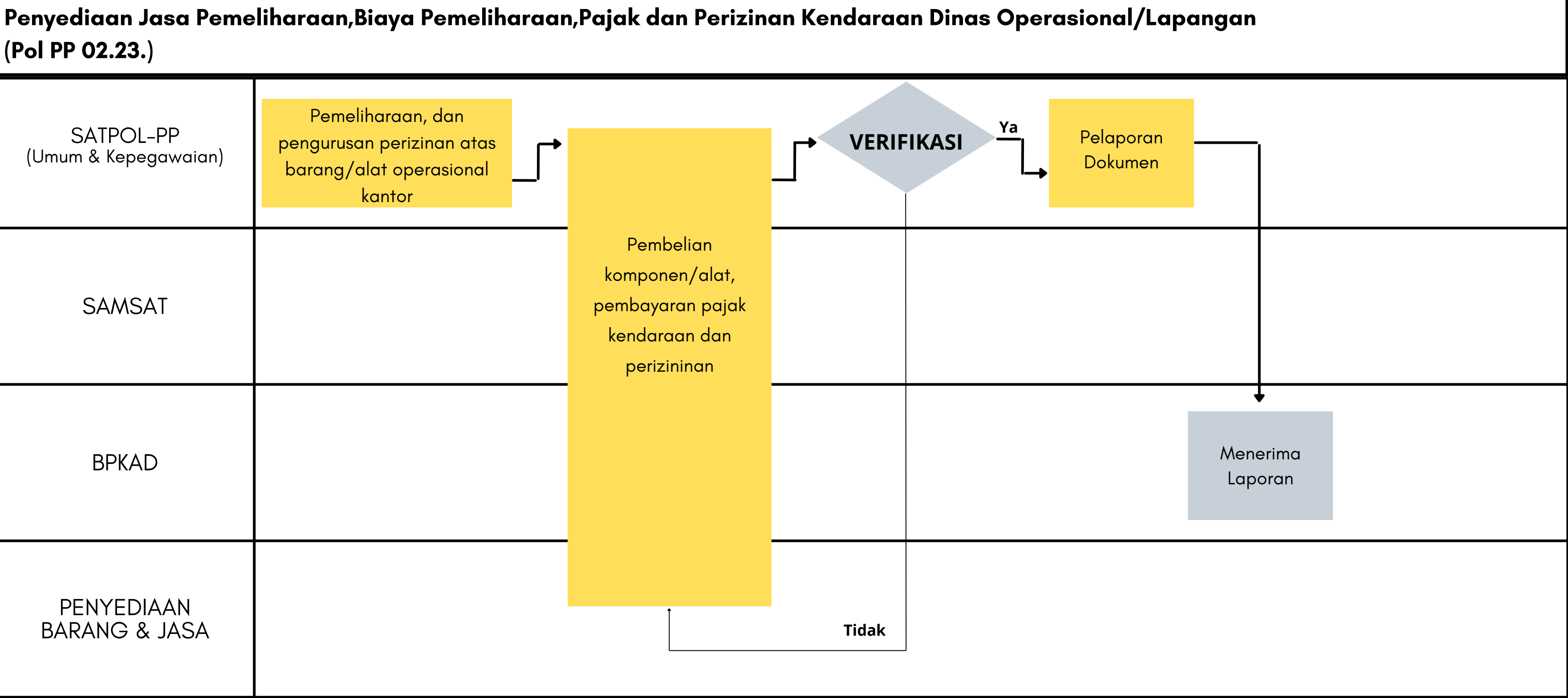


PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
(Pol PP 02.22.)

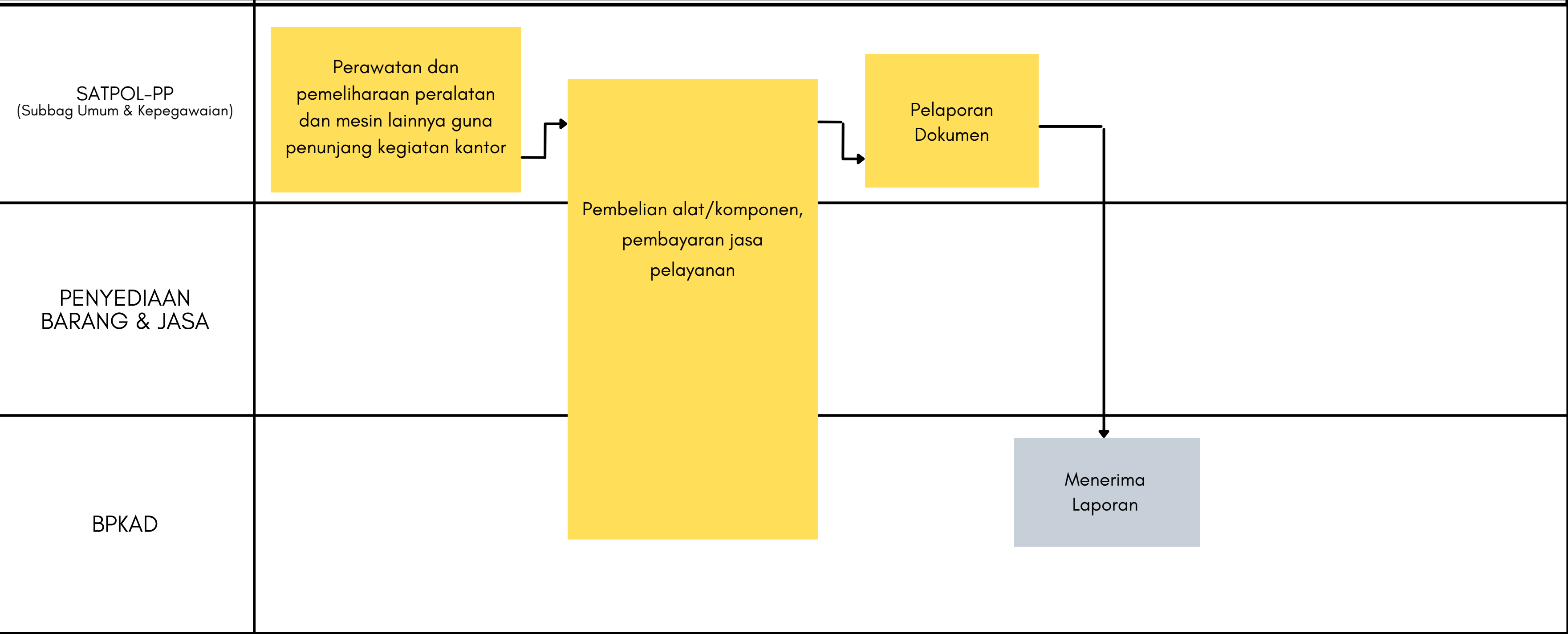


PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

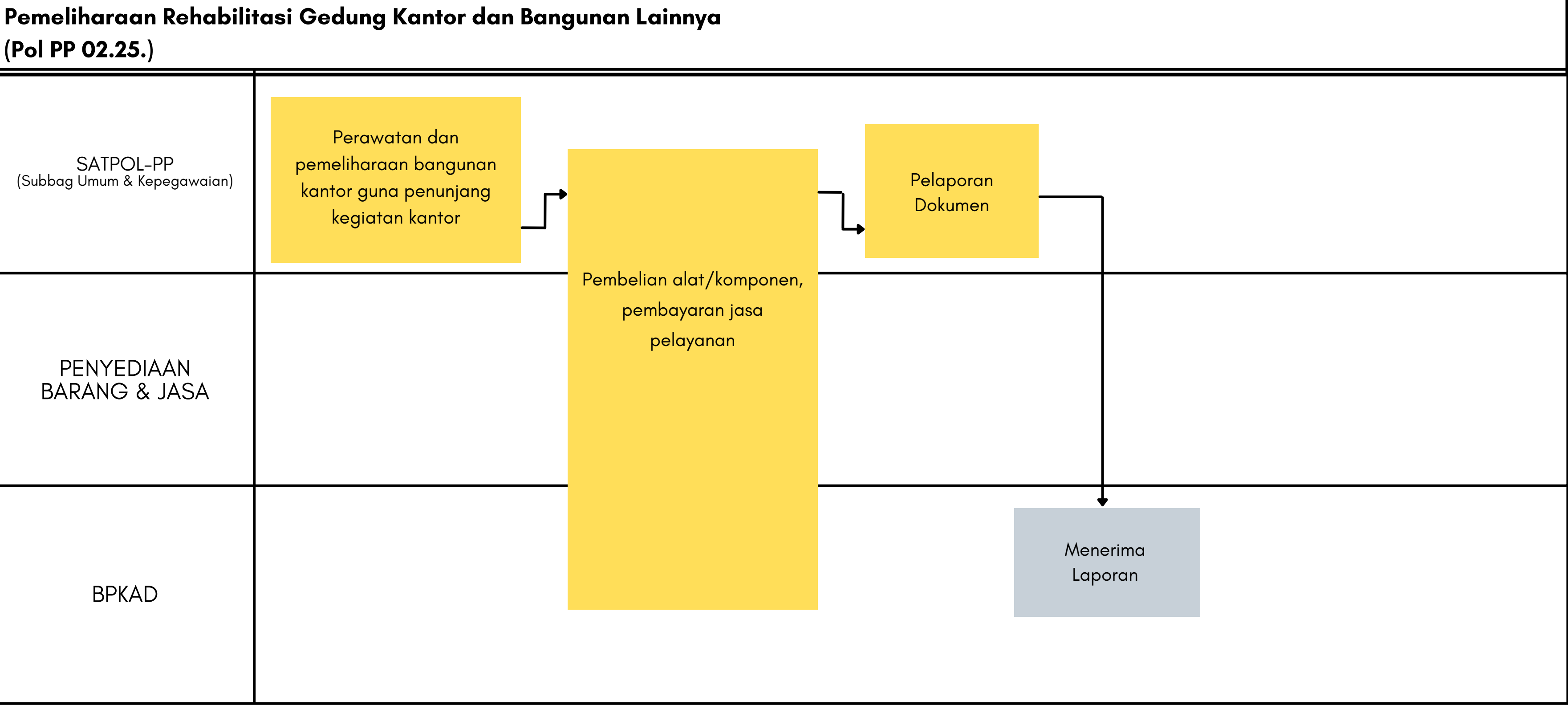


PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
(Pol PP 02.24.)



PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG



PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 01 : Meningkatnya Penyelenggaraan Perda dan Perkada

Pol PP 01.01. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1. BIRO HUKUM 2. SATPOL PP (BIDANG PPUD) 3. SATPOL PP Kab/Kota 4. Masyarakat	Pol PP 01.02. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1. SATPOL PP (BIDANG PPUD) 2. POLRI 3. SATPOL PP Kab/Kota 4. Masyarakat	Pol PP 01.03. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 1. SATPOL PP (BIDANG PPUD) 2. SATPOL PP Kab/Kota 3. Masyarakat
---	---	---

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.01. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Pol PP 02.02. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pol PP 02.03. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1. SATPOL PP (Tibum & Tranmas) 2. TNI/POLRI 3. DISHUB 4. OPD PEMPROV	1. SATPOL PP (Tibum & Tranmas) 2. TNI/POLRI 3. KESBANGPOL 4. Unit Intel Satpol PP 5. BIRO ADMINISTRASI & PEMERINTAHAN 6. SET. DPRD 7. OPD PEMPROV	1. SATPOL PP (Tibum & Tranmas) 2. BIRO ADMINISTRASI & PEMERINTAHAN 3. PIMPINAN DAERAH/PERWAKILANNYA

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.04. Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pol PP 02.05. Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Pol PP 02.06. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1. SATPOL PP (Bidang Linmas) 2. SEKDA PROVINSI LAMPUNG 3. BUPATI/WALIKOTA Se-Prov. Lampung 4. SATPOL PP KAB/KOTA 5. ANGGOTA LINMAS KAB/KOTA	1. SATPOL PP (Bidang Linmas) 2. SEKDA PROVINSI LAMPUNG 3. BUPATI/WALIKOTA Se-Prov. Lampung 4. SATPOL PP KAB/KOTA	1. SATPOL PP (Bidang SDM) 2. BPSDM 3. POLDA 4. SWASTA 5. RSUD ABDUL MOELOEK

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.07. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pol PP 02.08. Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Pol PP 02.09. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1. SATPOL PP (Bidang SDM) 2. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (KEMENDAGRI) 3. Badan Diklat Reserse Lemdiklat POLRI	1. SATPOL PP (Subbag. Perencanaan) 2. BAPPEDA 3. BPKAD 4. BIRO ORGANISASI 5. BALITBANGNOVDA 6. INSPEKTORAT	1. SATPOL PP (Subbag. Perencanaan) 2. BAPPEDA 3. BPKAD 4. BIRO ORGANISASI 5. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6. INSPEKTORAT

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pol PP 02.11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Pol PP 02.12 Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapopran Barang Milik Daerah Pada SKPD
1. SATPOL PP (Subbag. Perencanaan) 2. BAPPEDA 3. BPKAD 4. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5. BIRO ORGANISASI 6. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 7. INSPEKTORAT	1. SATPOL PP (Subbag. Keu. & Aset) 2. BPKAD 3.INSPEKTORAT	1. SATPOL PP (Subbag. Keu. & Aset) 2. BPKAD 3.INSPEKTORAT

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.13. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pol PP 02.14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pol PP 02.15. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1. SATPOL PP (Subbag. Keu. & Aset) 2. BPKAD 3.INSPEKTORAT	1. SATPOL PP (Subbag. Keu. & Aset) 2. BPKAD 3.INSPEKTORAT	1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. BKD 3. BIRO ORGANISASI 4. KEMENDAGRI

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	Pol PP 02.17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pol PP 02.18. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. PBJ 3. PLN	1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. PBJ 3. BPKAD	1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. PBJ

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.19. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pol PP 02.20. Penyediaan Bahan / Material	Pol PP 02.21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. PBJ	1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. PBJ	1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. SATPOL PP Kab/Kota 3. OPD 4. KEMENDAGRI

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.22. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pol PP 02.23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Pol PP 02.24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. PLN 3. PDAM 4. TELKOM 5. DISKOMINFO	1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. SAMSAT 3. BPKAD 4. PBJ	1. SATPOL PP (Umum & Kepegawaian) 2. PBJ 3. BPKAD

PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

